SETDA
PROVINSI BANTEN

RENSTRA SETDA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Rancangan Akhir

setda@bantenprov.go.id
Sekretariat Daerah Provinsi Banten

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

20. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(4) Pagu indikatif program Renstra Perangkat Daerah dapat berubah berdasarkan kebutuhan fiscal daerah dan dinamika lingkungan pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan;

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;

c. bab III tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;

d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

e. bab V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan bagi Perangkat Daerah yang terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;

e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;

g. Dinas Sosial Provinsi Banten;

h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;

j. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;

k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;

l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;

m. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;

o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;

q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;

r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;

s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;

t. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;

u. Dinas Pertanian Provinsi Banten;

v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;

w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;

x. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;

aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;

bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

cc. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;

dd. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;

ee. Badan Penghubung Provinsi Banten;

ff. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; dan

gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4); dan

b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 telah dapat tersusun.

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah yang sudah dispesifikasikan dan disepakati dalam kinerja pelayanan pemerintah daerah yang terdapat pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing biro sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama periode tahun 2025-2029.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan kebijakannya secara konsisten, sinergis, efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Wassalammu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si

NIP. 19750428 199412 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.3.1 Maksud 3
1.3.2 Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 6
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah 6
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 6
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah 9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 11
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah ... 33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah 33
2.2.2 Isu Strategis Sekretariat Darah..... 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH 41
3.1 Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 41
3.2 Sasaran Sekretariat Daerah 41
3.3 Strategi Sekretariat Daerah 47
3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah 52
3.5 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029 53
3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah 62

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.. 68
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 68
4.2 Indikator Kinerja Utama..... 182
4.3 Indikator Kinerja Kunci..... 184

BAB V PENUTUP 188

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapituliasi Unit Organisasi dan Eselon di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	8
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.3	Komposisi Pendidikan Pegawai ASN Sekretariat Daerah	10
Tabel 2.4	Jenis Sarana dan Prasana Sekretariat Daerah	11
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 – 2022	14
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2024	15
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024	23
Tabel 2.9	Kelompok Sasaran Layanan	30
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah	32
Tabel 2.11	Isu Strategis Perangkat Daerah	39
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	43
Tabel 3.2	Strategi/Penahapan Pembangunan Sekretariat Daerah	48
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	52
Tabel 3.4	Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029	54
Tabel 3.5	Rumusan Program Provinsi Banten berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah	64
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah	70
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Beserta Target Dan Kebutuhan Pendanaan	129
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	179
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	183
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten	8
Gambar 3.1	Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029	63
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ SubKegiatan Renstra PD	69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, sesuai siklus perencanaan jangka menengah, perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis untuk periode 5 tahun berikutnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten harus menyusun dokumen perencanaan lima tahun yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, dokumen Rencana Strategis memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Fokus/Bidang Urusan dan Indikator Kinerja.

Sebagaimana diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah mencakup :

1). Pendahuluan;
2). Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Sekretariat Daerah;
3). Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Ssekretariat Daerah;
4). Program, kegiatan, sub kegiatan dan kerangka penyelenggaraan bidang urusan; dan
5). Penutup.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal hingga penyusunan rancangan akhir.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, keterkaitan antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Banten 2025–2029 dapat dilihat pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Dokumen Rencana Strategis juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2025-2029.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45), yaitu dalam mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Banten di bidang pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah. Peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur khusunya tujuan dan sasaran daerah banten adil tidak korupsi yaitu dengan mengontrol dari berbagai aspek terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah yang berjalan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang 59 tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359;

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59)
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, (Lembaran Negara Republik Indoneias Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
18. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman kebijakan perencanaan, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dibidang tatakelola pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029:

1. Menyelaraskan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten 2025–2029 dan mendukung pencapaian agenda RPJMN 2025–2029.
2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan bidang tatakelola pemerintahan.
3. Menetapkan arah kebijakan strategis, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendukung reformasi birokrasi.
4. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab awal ini akan mengemukakan secara ringkas latar belakang serta ruang lingkup, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Memuat informasi tentang Gambaran pelayanan Perangkat daerah meliputi: tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah, serta dijabarkan juga terhadap permasalahan dan isu strategis Perangkat daerah.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Pada bab ini memuat tentang Tujuan Perangkat Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab ini menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang pentingnya Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretarait Daerah mempunyai fungsi yaitu :

(a) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
(b) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
(c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
(d) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
(e) pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
(f) pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara sederhana tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diterjemahkan sebagai memfasilitasi tugas perangkat daerah dalam perumusan kebijakan daerah umum provinsi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Fasilitasi dalam perumusan kebijakan umum daerah termasuk di dalamnya penyusunan produk hukum dan naskah kerjasama, pemastian kualitas substansi kebijakan, pemantauan dampak kebijakan, serta evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan. Sementara itu fasilitasi terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan kelembagaan, pengelolaan regulasi daerah, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian, sebagaimana struktur, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijabarkan ke dalam tiga asisten dan tujuh biro dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan, pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum.

   Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

   a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;

b. Biro Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

2. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.

   Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan membawahkan:

   a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan serta kebijakan administrasi pembangunan;

   b. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

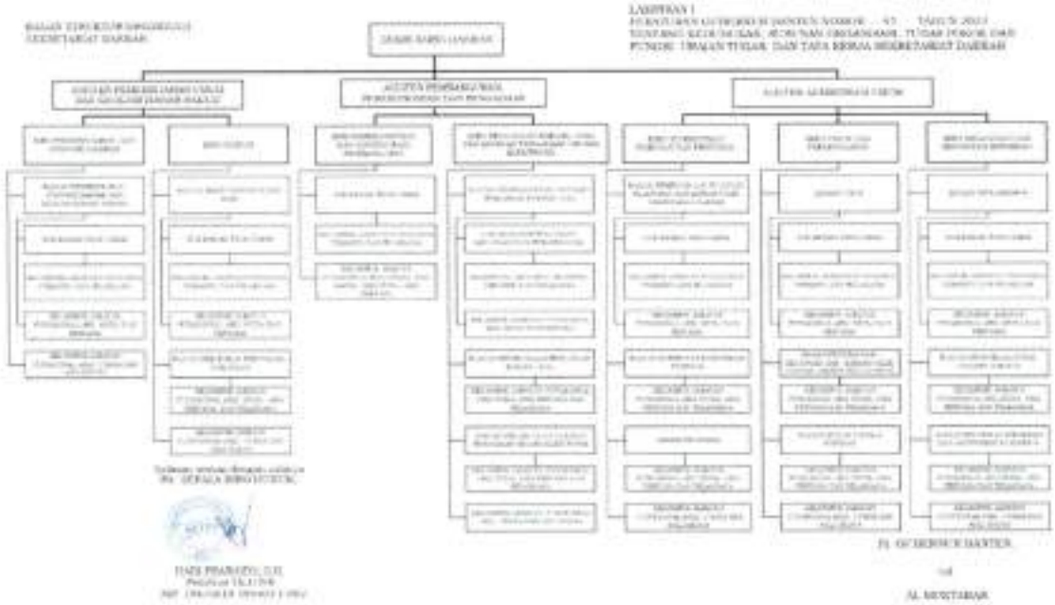
3. Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pimpinan, umum dan organisasi.

   Asisten Administrasi Umum membawahkan:

   a. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol;

b. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta Rumah Tangga Pimpinan;

c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sumber : Peraturan Gubernur Bnaten Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah

Saat ini sedang ada pembahasan terkait perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil rekomendasi Kemendagri Nomor : 000.9.5/4825/SJ, maka Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat akan dipecah menjadi 2 Biro yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Biro Kesejahateraan Rakyat, disertai perubahan jabatan struktural dari fungsional.

Adapun Rekapituliasi Unit Organisasi dan Eselon di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapituliasi Unit Organisasi dan Eselon di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON				
		I.b	II.a	II.b	III.a	IV.a
1	Sekretaris Daerah	1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1			

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON				
		I.b	II.a	II.b	III.a	IV.a
3	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			1	2	1
4	Biro Kesejahteraan Rakyat			1	2	1
5	Biro Hukum			1	3	1
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1			
7	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			1	2	1
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa			1	3	4
9	Asisten Administrasi Umum		1			
10	Biro Administrasi Pimpinan			1	3	7
11	Biro Umum			1	3	7
12	Biro Organisasi			1	3	4
JUMLAH		**1**	**3**	**8**	**21**	**26**

Sumber : Lampiran Surat Kemendagri Nomor : 000.9.5/4825/SJ, 2025

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar dan teknologi canggih namun tidak ada SDM yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran SDM dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi.

Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Non ASN), dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning service, dan pekerjaan- pekerjaan pelayanan lainnya.

Jabatan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Jabatan manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan nonmanajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Adapun untuk jabatan fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Daerah antara lain Analis Kebijakan, Analis Hukum, Analis SDM, Perencana Ahli Muda, Perancang Peraturan Peundang-undangan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pustakawan, Penata Layanan Opersional dan Admnistrasi Umum Perkantoran.

Berdasarkan data ASN sampai dengan bulan Agustus 2025 komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari PNS dan PPPK sebagaimana pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai ASN Sekretariat Daerah

NO	UNIT KERJA	PNS		PPPK		JULAH ASN	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat Daerah	9				9	-
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	33	19	10	21	43	40
3	Biro Hukum	19	22			19	22
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	18	9	6	31	24
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	57	13	34	9	91	22
6	Biro Umum dan Perlengkapan	31	21	126	73	157	94
7	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	32	15	32	25	64	40
8	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	22	12	5	2	27	14
Jumlah		**225**	**120**	**216**	**136**	**441**	**256**
Total		**345**		**352**		**697**	

Sumber : Data Hasil Olahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Dari sisi kualifikasi pendidikan ASN pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten cukup baik, hal tersebut bisa terlihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan D4/Sarjana (53,80%) dan Pasca Sarjana (18,22%) sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pendidikan Pegawai ASN Sekretariat Daerah

NO.	UNIT KERJA	SD	SMP	SMA	D2/D3	D4/S1	S2	S3	JUM
1	Sekretariat Daerah	-	-	1	1	3	3	2	9
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			4	1	52	25	1	83
3	Biro Hukum			4	-	17	20	-	41
4	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	15	4	23	12	1	55
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			28	3	63	18	1	113
6	Biro Umum dan Perlengkapan	-	-	75	7	152	17	-	251
7	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol			28	9	49	17	1	104
8	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			8	2	16	15	-	41
JUMLAH		-		**163**	**26**	**375**	**127**	**6**	**697**
Persentase		-	-	**23,39**	**3,73**	**53,80**	**18,22**	**0,86**	

Sumber : Data Hasil Olahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Namun demikian Sekretarait Daerah Provinsi Banten mempunyai komposisi pegawai dengan pendidikan SMA/sederajat sebanyak 163

pegawai atau (23,39%), jumlah tersebut lebih besar dari komposisi dengan pendidikan D2/D3 sebayak 26 pegawai (3,73%), selain itu Sekretariat Daerah memiliki Non ASN untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kinerja Sekretariat Daerah.

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang atau aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Banten meliputi tanah, bangunan, alat perlengkapan kantor, alat penyimpan data dan alat transportasi. Tanah dan bangunan milik Sekretariat Daerah tidak hanya ada di Kawasan Pusat Pemerinthan Provinsi Banten, namun juga di lokasi lain yang digunakan sebagai rumah dinas, data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah sebagaimana Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

No	Janis Sarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda 6	7 Unit
2	Kendaraan Roda 4	178 Unit
3	Kendaraan Roda 2	105 Unit
4	Rumah Dinas	2 Unit
5	Tempat Ibadah	3 Unit
6	Bangunan Lainnya	10 Unit
7	Kantor	2 Unit
8	Tanah	21 Unit

Sumber : Data Hasil Olahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Gedung Sekretariat Daerah Banten dimanfaatkan sebagai kantor Sekretaris Daerah dan tiga biro yaitu Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, dan Biro Hukum. Adapun Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berkantor di Gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu.

Gedung Pendopo, digunakan sebagai kantor kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan aula untuk acara kenegaraan.

Rumah Dinas, merupakan rumah dinas jabatan untuk gubernur dan wakil gubernur, rumah dinas yang beralamat di Jl. Brigjen K.H. Syam'un no 5 Kota Serang diperuntukkan rumah dinas jabatan gubernur, dan rumah dinas Wakil gubernur beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Cipete Kota Serang. Di samping itu, sarana prasarana kantor seperti alat penyimpan data, perlengkapan rumah tangga, serta sarana mobilitas berada dalam kondisi baik dengan jumlah yang cukup bagi seluruh pegawai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sebagaimana telah disampaikan bahwa core business Sekretariat Daerah adalah pada perumusan kebijakan umum daerah provinsi. Peran ini, pada rencana strategis periode 2023-2026 belum memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang

menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2024 terealisasi pada predikat B.

Penerjemahan peran Sekretariat Daerah pada periode 2023-2026 dituangkan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis. Pada kurun waktu tiga tahun (2023-2026) sasaran Sekretariat Daerah tidak mengalami perubahan. Namun dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaannya perlu ditingkatkan mengenai efektifitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Banten.

Sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan 2023-2026 yang menetapkan 12 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja utama. Secara umum, sasaran strategis mengarah pada dua klasifikasi yaitu pada pemastian kualitas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten serta pada pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pada pemastian kualitas kebijakan, sasaran strategis ditetapkan dengan kalimat 'meningkatnya kualitas kebijakan'. Sasaran ini difokuskan pada kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga tolok ukur pencapaiannya diamanatkan kepada tiga biro yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Secara teknis, kinerja ketiga biro tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dari mulai perencanaan hingga evaluasi dipenuhi dan dipatuhi. Adapun pengukuran didasari pada perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Kemudian, pada pemastian implementasi kebijakan dilakukan dengan menetapkan tiga belas sasaran kinerja.

Sasaran kinerja pertama, meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi yang ditetapkan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan Banten yaitu 'terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa' dan merupakan penerapan dari kebijakan terkait reformasi birokrasi. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada seluruh biro di lingkungan Sekrtariat Daerah. Pengukuran yang menjadi tolok ukur pencapaiannya didasarkan pada perhitungan evaluasi penerapan reformasi birokrasi sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran kinerja kedua adalah meningkatnya meningkatnya kualitas kelembagaan yang terukur diamanatkan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran kinerja ketiga adalah meningkatnya kerjasama dan penyelenggaraan administrsi pemerintahan, diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sasaran kinerja keempat adalah meningkatnya kebijakan

kesejahteraan rakyat, diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sasaran kinerja kelima adalah meningkatnya kualitas kebijakan daerah, diamanatkan hanya kepada Biro Hukum.

Sasaran keenam adalah meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diamanatkan hanya kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Sasaran kinerja ketujuh adalah meningkatnya kualitas administrasi pembangunan daerah, diamanatkan hanya kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Sasaran kinerja kedelapan adalah meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian daerah, diamanatkan hanya kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Sasaran kinerja kesembilan adalah meningkatnya kualitas kelembagaan yang terukur, diamanatkan hanya kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran kinerja kesepuluh adalah meningkatnya kepatuhan pelayanan publik, diamanatkan hanya kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran kinerja kesebelas adalah meningkatnya kualitas layanan pimpinan daerah, diamanatkan hanya kepada Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

Sasaran kinerja keduabelas adalah meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah, diamanatkan hanya kepada Biro Umum dan Perlengkapan.

Dari sasaran kedua sampai dengan sasaran keduabelas ditetapkan sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Banten yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, pencapaian kinerja pelayanan dari sisi outcome dan impact selama tahun 2020-2024 atau selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2020 – 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN									KETEERANGAN
				2020			2021			2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	N/A	N/A	N/A	85	80,25	94,41%	85	80,25	94,41%	Indikator Kinreja Mengacu Pada Renstra Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja
2	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;	Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
3	Meningkatnya tatalaksana organisasi yang efektif.	Presentase manajemen reformasi birokrasi	%	100	100	100%	100	100	100%	100	91	91%	
4	Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima;	Presentase peningkatan pelayanan umum yang prima	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
5	Meningkatnya administrasi pembangunan daerah	Presentase realisasi layanan dan administrasi pembangunan daerah	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
6	Meningkatnya kebijakan perekonomian daerah dan pembinaan pengendalian bidang perekonomian	Capaian kebijakan perekonomian daerah	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
7	Meningkatnya pelayanan dan fasilitasi pimpinan	Presentase peningkatan pelayanan fasilitasi pimpinan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN									KETEERANGAN
				2020			2021			2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
8	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan	Presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	%	100	95	95%	100	100	100%	100	100	100%	
		Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
9	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;	Presentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
10	Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah.	Persentase rumusan kebijakan infrastruktur daerah	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023 – 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN						KETEERANGAN
				2023			2024			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80	78.10	100,31%	70-80	78,40	112%	Indikator Kinerja Mengacu Pada Renstra Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	71	118,33%	71	66,77	94,04%	
3	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	4,24	3,45	81,37%	4,29	3,46	80,65%	
4	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,8	88,59	109,64%	86,55	89,23	103,10%	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN						KETEERANGAN
				2023			2024			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	Jasa yang baik dan bebas KKN									
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase Realisasi Rumusan Bidang Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	%	100	89,81	89,81%	100	71,43	71,43%	
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	%	100	88,72	88,72%	100	133	133,00%	
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	
9	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan yang terukur	Indeks Kelembagaan	Nilai	41-60	84,2	205,37%	84,20	84,20	100,00%	
10	Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	91,16	111,43%	91,16	91,16	100,00%	
11	Meningkatnya Kulaitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,24	95,08%	11,17	10,72	95,97%	
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Setda	Presentase Realisasi Pelayanan Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Penjabaran Tabel 2.6, terjadi perubahan indikator kinerja utama pada periode Renstra Tahun 2023-2026, dilihat dari data capaian kinerja tahun 2023-2024 terjadi perubahan indikator kinerja utama hal tersebut didasari atas evaluasi terhadap indikator kinerja utama pada periode Renstra tahun sebelumnya, dari data capaian pada tabel tersebut diketahui capaian atas target yang ditentukan masih belum konsisten masih ada beberapa indikator yang perlu penyesuaian kembali baik nomenklatur dan target capaiannya.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Persen	100	100	100
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Persen	100	100	100
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			Persen	100	100	100
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah			Persen	100	100	100
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Persen	100	100	100
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	Persen	100	100	100
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persen	100	100	100
Biro Humum								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	100	100

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
		Provinsi						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Persen	100	100	100
		Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			Persen	100	100	100
		Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional			Persen	100	100	100
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM			Persen	100	100	100
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persen	100	99,39	99,39
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	100	100
Biro Peremonomian dan Administrasi Pembangunan								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	92,06	92,06
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah	Persen	100	84,57	84,57

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	59,73	59,73
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	74,58	74,58
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	100	98,07	98,07
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	75,24	75,24
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian			Persen	100	90,66	90,66
		Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan			Persen	100	77,68	77,68
		Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah			Persen	100	97,82	97,82
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Kooordinasi Perekonomian	Persen	100	77,68	77,68
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persen	100	97,82	97,82
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persen	100	90,66	90,66
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan			Persen	100	89,81	89,81
		Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi						
		Pembangunan sebagai bahan evaluasi						
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	85,23	85,23
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	100
			Perencanaan,	Persentase Ketercapaian Kegiatan	Persen	100	100	100

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	100
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan			Persen	100	100	100
		B. Tingkat Kematangan UKPBJ						
		C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ						
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100	100	100
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	100%
		Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			Persen	100	100	100%
		Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan			Persen	100	100	100%

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100%
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	100%
			Fasilitasi Keporotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Persen	100	100	100%
Biro Umum dan Perlengkapan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	100%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha	Persen	100	100	100%
			Administrasi Keuangan dan	Persentase capaian tata kelola keuangan	Persen	100	100	100%

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
			Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan aset SETDA				
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA	Persen	100	100	100%
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	100,00%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100,00%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	99	99,00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	98	98,00%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00%
	Program Penataan Organisasi	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja			Persen	100	95	95,00%
		Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan			Persen	100	95	95,00%
		Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik			Persen	100	95	95,00%
		Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja			Persen	100	95	95,00%
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen	100	95	95,00%
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Kauntabilitas Kinerja	Persen	100	95	95,00%

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Program Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
1	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	**100,0%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Persen	100	100	**100,0%**
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persen	100	100	**100,0%**
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
					Persen	**100**	**100**	**100,0%**
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual	Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Ketercapaian Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persen	100	100	**100,0%**
2	**Biro Hukum**							
	PROGRAM PENUNJANG	Persentase Ketercapaian dari Seluruh			Persen	100	100	**100,0%**

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Hukum)	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
					Nilai	71	66,77	**94,0%**
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Persen	100	100	**100,0%**
		Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			Persen	100	100	**100,0%**
		Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional			Persen	100	100	**100,0%**
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM			Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100	100	**100,0%**
3	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	**100,0%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah	Persen	100	37	**37,0%**

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	5	**5,0%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100	14	**14,0%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	Persen	100	11	**11,0%**
					Persen	100	100	**100,0%**
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian			Persen	100	100	**100,0%**
		Persentase tersedianya Perumusan Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan			Persen	100	100	**100,0%**
		Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah			Persen	100	100	**100,0%**
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Kooordinasi Perekonomian	Persen	100	13	**13,0%**
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persen	100	9	**9,0%**
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persen	100	6	**6,0%**
					Persen	100		**0,0%**
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan			Persen	100	100	100,0%
		Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi						
		Pembangunan sebagai bahan evaluasi						
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	7	**7,0%**
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	24	**24,0%**
4	**Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE**							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang			Persen	100	98,4	**98,4%**

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
	DAERAH PROVINSI	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	92	**92,0%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	**100,0%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Persen	100	100	**100,0%**
					Nilai	86,55	89,23	**103,1%**
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan			Nilai	30	23,14	**77,1%**
		B. Tingkat Kematangan UKPBJ				31,11	40	**128,6%**
		C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ				25,43	26,09	**102,6%**
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	75	**75,0%**
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100	100	**100,0%**
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	**100,0%**
5	**Biro Adminsitrasi Pimpinan dna Protokol**							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	**100,0%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Persen	100	100	**100,0%**

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
			Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Sekretariat Daerah				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase capaian Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			Persen	100	100	**100,0%**
		Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan			Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	**100,0%**
			Fasilitasi Keporotokolan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Persen	100	100	**100,0%**
6	**Biro Umum dan Perlengkapan**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	**100,0%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	**100,0%**
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	**100,0%**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	**100,0%**
			Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha	Persen	100	100	**100,0%**

NO	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA	Persen	100	100	100,0%
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA	Persen	100	100	100,0%
7	**Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi**							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persen	100	100	100,0%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	7	7	100,0%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persen	5	5	100,0%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	2	2	100,0%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	6	6	100,0%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	13	13	100,0%
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja			Persen	100	100	100,0%
		Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan			Persen	100	100	100,0%
		Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik			Persen	100	100	100,0%
		Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja			Persen	100	100	100,0%
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen	100	100	100,0%
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Kauntabilitas Kinerja	Persen	100	100	100,0%

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Secara sederhana, stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi, berikut ini adalah kelompok sasaran layanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebagaimana Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Layanan

No	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	Uraian Pelayanan	Kelompok Sasaran Layanan
1	Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.	Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Keagamaan, Masyarakat dan Badan Usaha.
		Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat
		Pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah Perekonomian, pembangunan dan kebijakan administrasi Pembangunan	Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
		Perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa;	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat
		Pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi;	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	Uraian Pelayanan	Kelompok Sasaran Layanan
		Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dan Masyarakat.
		Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta Rumah Tangga Pimpinan	Perangkat Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Seluruh Pegawai pada Sekretariat Daerah.

Sumber : Data Hasil Olahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			RASIO ANGGARAN (%)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE	4.075.635.850	4.080.785.485	3.728.943.760	3.741.958.065	3.846.866.396	3.526.575.786	91,81%	94,27%	94,57%	0,41%	-0,67%
2	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3.817.950.000	3.753.682.000	4.181.549.090	3.528.423.175	3.228.042.147	3.789.654.991	92,42%	86,00%	90,63%	-0,97%	-1,55%
3	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2.923.970.000	2.773.092.000	2.582.212.902	2.214.284.636	2.429.102.103	2.320.130.347	75,73%	87,60%	89,85%	-1,94%	4,14%
4	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	15.094.408.600	11.074.513.000	10.039.139.550	14.535.403.619	9.843.261.653	9.397.341.248	96,30%	88,88%	93,61%	-13,16%	-8,15%
5	Biro Umum dan Perlengkapan	218.446.667.100	200.205.899.215	203.259.941.146	197.968.798.573	183.633.731.061	193.429.640.480	90,63%	91,72%	95,16%	2,33%	5,45%
6	Biro Hukum	3.982.976.000	3.292.050.000	2.788.197.136	2.864.677.361	2.857.581.090	2.551.667.954	71,92%	86,80%	91,52%	-2,78%	5,83%
7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	32.746.337.500	23.031.247.500	25.354.482.730	19.679.616.913	19.828.688.186	20.644.132.657	60,10%	86,09%	81,42%	14,28%	6,16%

Sumber : Data Hasil Olahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan Layanan Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Banten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Banten bertugas membantu Gubernur Banten dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara optimal. Namun demikian upaya-upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tujuan, sehingga munculnya berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang berada pada lingkup tugas pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian tugas perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Pengidentifikasian permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah dilakukan dengan mengulas kondisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sebagaimana upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana norma yang telah ditetapkan. Tentunya hasil yang telah dicapai dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal.

1. Permasalahan Internal
   a. Permasalahan Pelayanan dalam Fungsi Perumusan Kebijakan: Didalam pelaksanaan fungsi 'perumusan kebijakan' dengan sasaran adanya peningkatan kualitas kebijakan, permasalahan yang ditemui berkaitan dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Berdasarkan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, terdapat empat komponen dalam siklus kebijakan yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Adapun hasil penilaian LAN pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten di Tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan yang ditargetken mendapat nilai 71 tercapai 66,77. Walaupun capaiannya berada dalam kategori 'Baik' atau pada nilai 66,77, dari hasil kajian dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Sekretariat Daerah Provinsi Banten melalui Biro Hukum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
      - Dalam aspek substansi kebijakan perlu terus ditingkatkan dengan adanya proses kajian dan analisis kebijakan yang didukung dengan data, informasi dan pengetahuan yang

faktual dan relevan dengan kondisi di lapangan;

- Pelibatan stakholder dalam proses perumusan kebijakan perlu dilakukan lebih representatif termasuk dengan stakholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan;
- Melakukan proses dokumentasi pengelolaan kebijakan yang telah dilakukan dari proses pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi dampak kebijakan;
- Peningkatan dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan, kajian dan analisis kebijakan yang dilakukan, dengan mengoptimalkan para analis kebijakan yang telah dilantik yang berasal dari internal pemerintah Provinsi Banten.

b. Permasalahan Pelayanan dalam Fungsi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan: Dalam pelaksanaan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi Banten baru memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

c. Permasalahan Internal Sekretariat Daerah: Berhasil tidaknya pencapaian target kinerja tergantung kepada lingkungan organisasi terutama lingkungan internal. Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di internal Sekretariat Daerah tidak dapat diabaikan. Adapun identifikasi permasalahan internal Sekretariat Daerah diklasifikasikan dalam lima kondisi yaitu struktur, sistem/teknologi, sumber daya manusia, budaya, lingkungan hidup. Kelima kondisi ini diidentifikasi dalam ruang lingkup core business pelayanan Sekretariat Daerah.

d. Struktur Organisasi: Struktur organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, struktur tersebut mengalami perubahan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan struktur organisasi, dimana capaian penyederhanaan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten mencapai 100 persen. Sekretariat Daerah merupakan satu-satunya unit kerja yang dikepalai oleh seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon 1), yang membawahi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2a) yaitu Asisten Daerah sebanyak tiga pejabat, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2b) yiatu Kepala Biro sebanyak tujuh pejabat. Kondisi ini

menyebabkan rentang koordinasi dan kendali cukup panjang.

e. Mekanisme Kerja: Berkaitan dengan sistem kerja, Sekretariat Daerah belum mengimplementasikannya secara optimal. Hal tersebut dikarenakan masih melekatnya budaya silo, sehingga komunikasi terbuka dan sharing knowledge belum diterapkan secara maksimal.

   Dilihat dari komposisi kualifikasi, 47,21% PNS Sekretariat Daerah bergelar sarjana dan 36,36% PNS bergelar pasca sarjana. Kualifikasi tersebut sinkron dengan karakter tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang kualitatif. Kemudian, ditambah dengan pengawai Non ASN yang akan diangkat sebagai Pegawai Pemeerintah dengan Perjanjian Kerja.

   Selanjutnya, Sekretariat Daerah belum memiliki peta pengembangan kompetensi yang mencakup seluruh biro. Akibatnya, beberapa biro melakukan perencanaan pengembangan tersendiri yang tidak disertai dengan pelaporan kepada kepegawaian Sekretariat Daerah. Sehingga tidak ada rekam jejak peningkatan kompetensi yang dibagi bersama.

f. Budaya Kerja: Berdasarkan Hasil penilaian budaya kerja award (Implementasi core values ASN BerAKHLAK) yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 memperlihatkan bahwa Sekretariat Daerah telah mempraktikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK yang konsisten. Adapun nilai yang diperoleh Sekretariat Daerah adalah sebesar 88.00 dan terbaik untuk kategori perangkat daerah sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Sekretariat Daerah telah dapat mengedukasi pihak lain untuk membangun kerja sama yang sinergis. Hal ini mencakup tindakan memberi kesempatan serta bersikap terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

g. Namun demikian, nilai tersebut masih dikatakan belum cukup karena nilai maksimal internalisasi budaya berAkhlak pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah 100. Tingkat selanjutnya adalah mampu merancang program yang memudahkan pihak lain untuk mempraktekan sikap berAkhlak. Salah satunya adalah dengan memahami kebutuhan masyarakat, solutif, dapat diandalkan, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan.

h. Lingkungan Kerja

   Lingkungan kerja sangat berpengaruh dalam meingkatkan kinerja terutama dalam efisiensi waktu koordinasi antar biro, namun di Sekretriat Daerah tempat kerja dari tujuh biro yang ada terbagi menjadi dua tempat dimana tiga biro yaitu Biro Umum dan Perlangkapan, Biro Hukum dan Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol berkantor di Gedung Sekretariat Daerah, sedangkan empat Biro yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi,

Biro Perekonomian dan Administrasi Perambangunan dan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE berkantor di Gedung SKPD Terpadu, hal ini menjadi masalah dalam mempercepat koordinasi, pengumpulan data serta hal-hal lain yang menunjang pada peningkatan kinerja pegawai.

2. Permasalahan Eksternal
   a. Koordinasi dengan Instansi Lain, Kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga swadaya masyarakat.
   b. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat, Perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat mempengaruhi program dan kegiatan di provinsi, sehingga memerlukan penyesuaian dan adaptasi.
   c. Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga memerlukan prioritas dan pengelolaan anggaran yang efektif.
   d. Keterlibatan Masyarakat, Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan, sehingga memerlukan komunikasi dan partisipasi yang efektif terutama dalam proses penyusunan rumusan kebijakan.
   e. Sarana dan Prasarana dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang mobilitas tinggi seperti pelayanan pada pimpinan sehingga memerlukan investasi dan pengembangan yang tepat.
   f. Kerjasama dengan perangkat daerah, Kerjasama dengan perangkat daerah masih belum optimal terutama pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan keterlibatan perangkat daerah seperti input laporan pelaksanaan pekerjaan.

   Dari uraian diatas dapat diambil beberapa faktor yang menghambat dan yang mendorong terhadap pelayanan sebagai berikut :

   Faktor Penghambat :

   a. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas, dapat menghambat kualitas pelayanan;
   b. Birokrasi yang Rumit : Proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat memperlambat pelayanan dan membuat masyarakat merasa frustrasi;
   c. Kurangnya Pelatihan : Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi staf pelayanan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan;
   d. Teknologi yang Tidak Memadai : Teknologi yang tidak memadai dapat memperlambat pelayanan dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman;
   e. Kurangnya Komunikasi: Kurangnya komunikasi yang efektif antara petugas pelayanan dan masyarakat dapat

mempengaruhi kualitas pelayanan.

Faktor Pendorong:

a. Komitmen Pimpinan : Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat mempengaruhi budaya pelayanan di organisasi;
b. Pelatihan dan Pengembangan : Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi staf pelayanan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
c. Teknologi yang Memadai : Teknologi yang memadai dan tepat dapat mempercepat pelayanan dan membuat masyarakat merasa lebih nyaman;
d. Komunikasi yang Efektif : Komunikasi yang efektif antara petugas pelayanan dan perangkat daerah maupun masyarakat dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.;
e. Sistem Pengawasan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat merupakan hal efektif yang dapat memastikan kualitas pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas.

2.2.2 Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kemudian isu strategis memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Rumusan isu strategis harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Atas dasar hal tersebut, penentuan isu strategis pada setda dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pada tingkat internasional, nasional, dan provinsi sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi.

Pada tingkat internasional, Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda penting yang disepakati oleh para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Agenda ini menginginkan tidak ada satu orang pun yang tidak tersentuh oleh pembangunan (no one left behind). Untuk mewujudkan itu, SDGs memiliki 17 sasaran dan 169 indikator yang mencakup empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola.

Pada pilar hukum dan tata kelola, kelembagaan yang tangguh (strong institution) menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai (SDGs 16). Salah satu fokus pada sasaran ini adalah kondisi pemerintahan

sebagai institusi penggerak pembangunan. Bahwa kelembagaan yang tangguh akan mendukung pencapaian target-target SDGs lainnya dan untuk mewujudkan itu, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu efektivitas, transparansi, akuntabilitas, anti korupsi, pelibatan yang setara dalam pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Sejalan dengan Agenda 2030 SDGs, Indonesia menetapkan Visi 2045 yang juga mengusung keinginan 'no one left behind'. Visi ini ditopang oleh empat pilar yaitu pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar terakhir, merupakan aplikasi SDGs 16 di Indonesia.

Selanjutnya, penerjemahan Visi Indonesia 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 berisikan target sasaran utama visi yang terukur sebagai wujud cerminan akan kondisi pembangunan yang diharapkan guna mencapai Banten di Tahun 2045 menjadi Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa. Representasi keberhasilan pembangunan Tahun 2025-2029 terhadap pencapaian sasaran utama visi berupa: 1) peningkatan pendapatan per kapita; 2) pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; 3) kepemimpinan daerah sebagai penghubung integrasi ekonomi pulau Sumatera-Jawa serta penyangga industri nasional; 4) peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan penurunan emisi GRK menuju net zero.

Berikut ini adalah uraian penentuan isu Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
• Pelayanan Publik yang Lebih Baik • Pusat Pengelolaan Kebijakan	• Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal • Perekonomian Yang Melambat Dan Belum Merata	-	• Sustainable Development Goal's (Sdg's)	• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	• Tantangan pembangunan daerah	Pemantapan Reformasi Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani

Sumber : Data Hasil Olahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Dari uraian isu-isu strategis secara berjenjang di atas, serta mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaraan kinerja Sekretariat Daerah pada periode sebelumnya, maka isu strategis Sekretariat Daerah adalah: "**Pemantapan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani**". Berkaitan hal ini, arah kebijakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah penerapan reformasi birokrasi pada seluruh level pemerintah. Kebijakan terbaru adalah adanya pemfokusan penerapan pada dua sisi. Pertama adalah reformasi birokrasi secara umum atau diistilahkan sebagai reformasi birokrasi general dan kedua adalah reformasi birokrasi tematik untuk melihat dampak penerapan reformasi birokrasi terhadap kondisi pembangunan masyarakat. Mengingat pembaharuan tersebut untuk periode Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah akan memfokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi general.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Banten, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Adapun tujuan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif;
2. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi;
3. Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif.

3.2 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mencapai tujuan perangkat daerah pada Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjabarkannya kedalam sasaran daerah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Umum dan Pimpinan;
3. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima;
4. Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi;

5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Administrasi Pembangunan;
6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan;
8. Meningkatnya Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
9. Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif;
10. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Meningkatnya Budaya Kerja ASN.

Berikut disampaikan Isu Strategis, Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah Organisasi	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3.84	3.95	4.05	4.14	4.32	4.35	
Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif		Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	94.02	94.04	94.06	94.08	94.10	94.12	
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif		Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks)	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.80	
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks)	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.80	
	Terwujudnya		Indeks Kualitas	66.77	66.77	66.8	66.8	66.9	67.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif		Kebijakan (Indeks)							
		Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	99.41	99.42	99.43	99.44	99.45	99.46	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi)	7	8	9	10	11	12	
		Meningkatnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan (%)							
	Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah Organisasi		Nilai SAKIP (Nilai)	70.1	72.41	74.95	76.65	80.05	80.9	
		Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	11.1	11.8	12	12.2	13.50	13.60	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	3,64	
	Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif		Indeks Integritas Nasional (Indeks)	72.74	74	76	78	80	82	
		Meningkatnya	Indeks Tata Kelola	89.30	89.40	90.50	90.70	90.80	91.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai)							
		Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Indeks ASN Berakhlak (Nilai)	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	81.00	

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

3.3 Strategi Sekretariat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaiman tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkain arah kebijakan, selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Berikut disampaikan Strategi/ Penahapan Pembangunan Sekretariat Daerah, sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Strategi/Penahapan Pembangunan Sekretariat Daerah

SASARAN PD	TAHAP I 2026 **Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan**	TAHAP II 2027 **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	TAHAP III 2028 **Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian**	TAHAP IV 2029 **Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi**	TAHAP V 2030 **Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
Meningkatnya hubungan kerjasama yang diimplementasikan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam pengelolaan hubungan kerjasama antar daerah, regional, internasional, dan badan usaha	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan evaluasi penyclenggaraan kerjasama	Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penguatan pengendalian kerjasama antar daerah, regional, internasional, dan badan usaha	Pemantapan kerjasama yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Penguatan kolaborasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat	Percepatan implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan	Pemantapan kebijakan kesejahateraan rakyat yang berdampak
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pada pengelolaan administrasi tata pemerintahan dalam penyelenggaraan	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam penataan administrasi tata pemerintahan	Akselerasi penataan administrasi tata pemerintahan dan optimalisasi persiapan daerah otonom baru	Penguatan kolaborasi dalam persiapan daerah otonom baru serta penguatan evaluasi dan pengendalian pentaan administrasi pemerintahan	Pemantapan daerah otonom baru dalam peningkatan kesejahteraan masyrakat dan daya saing daerah

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	**Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian**	**Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi**	**Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
	otonomi daerah				
Meningkatnya harmonisasi kebijakan dan regulasi	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang perancang hukum dan perundang-undangan	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan produk hukum daerah dan peningkatan kualitas jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	Penguatan kualitas layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	Penguatan kolaborasi antara stakeholder dalam peningkatan fasilitasi masalah hukum	Pemantapan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah secara digitalisasi serta penyelesaian masalah hukum secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien
Meningkatnya kepatuhan implementasi standar pelayanan publik yang berkelanjutan	Peningkatan pembinaan perangkat daerah dalam implementasi maklumat pelayanan publik	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) serta pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan publik	Penguatan kolaborasi dalam peningkatan pelayanan publik serta penguatan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi dalam menuju pelayanan publik yang prima	Pemantapan pelayanan publik yang prima secara digitalisasi terintegrasi
Meningkatnya pelaporan kinerja yang informatif	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam kualitas pelaporan kinerja informatif	Peningkatan kualitas koordinasi antar unit organisasi dalam penyusunan laporan kinerja	Penguatan kolaborasi dan penyusunan laporan kinerja secara digitalisasi	Penguatan evaluasi dan monitoring dalam penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	Pemantapan laporan kinerja yang informatif sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja
Meningkatnya budaya kerja asn	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam penguatan	Peningkatan kualitas implementasi sistem kerja dalam penyelenggaraan organisasi yang	Penguatan kolaborasi dan implementasi sistem kerja untuk mewujudkan organisasi yang berdampak	Penguatan evaluasi dan monitoring implementasi budaya kerja dalam mewujudkan sistem	Pemantapan budaya kerja dan sisem kerja dalam mewujudkan banten melayani

SASARAN PD	TAHAP I 2026 **Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan**	TAHAP II 2027 **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	TAHAP III 2028 **Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian**	TAHAP IV 2029 **Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi**	TAHAP V 2030 **Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
	implementasi core values asn berakhlak	akuntabel, efektif, efisien dan lincah		kerja yang akuntabel, efektif, efisien dan lincah	
Meningkatnya pelayanan sekretariat daerah yang prima	Peningkatan kapasitas sumber daya manuasi (SDM) aparatur dalam fasilitasi administrasi setda dan peningkatan kualitas distribusi fasilitas setda yang sesuai dengan regulasi	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam meningkatkan pelayanan sekretariat daerah yang prima	Penguatan monitoring dan evaluasi dalam mewujudkan pelayanan setda yang prima	Penguatan kolaborasi dan digitalisasi pelayanan setda yang cepat, tanggap dan lincah	Pemantapan pelayanan setda secara digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien
Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengadaan barang dan jasa	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara digitalisasi	Akselerasi pengadaan barang/jasa secara digital dan penguatan monitoring evaluasi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa	Penguatan kolaborasi dalam penyelenggaraan pengadaan baran/jasa secara digital	Pemantapan pegadaan barang/jasa secara digital, akuntabel, efektif, efisien dan transparan
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam administrasi pembangunan	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengendalian administrasi pembangunan	Penguatan kolaborasi dalam pengendalian adminitrasi pembangunan	Percepatan implementasi hasil pengendalian administrasi pembangunan secara berkelanjutan	Pemantapan administrasi pembangunan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien
Meningkatnya kualitas	Peningkatan	Penguatan standar	Penguatan kolaborasi	Akselerasi	Pemantapan kebijakan

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	**Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	**Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian**	**Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi**	**Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
kebijakan perekonomian dan pembangunan	kapasitas sumber daya manuasi (SDM) aparatur dalam perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan	operasional prosedur (SOP) dalam penyusunan rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan	dalam implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berdampak	implementasi kebijkan perekonomian dan pembangunan yang berdaya saing	perkonomian dan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya pelayanan pimpinan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam pelayanan pimpinan	Penguatan standar operasional prosedur (SOP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	Penguatan kolaborasi dalam peningkatan pelayanan pimpinan serta penguatan monitoring dan evaluasi	Penguatan pelayanan pimpinan dengan memanfaatkan inovasi digitalisasi	Pemantapan pelayanan yang cepat, tanggap, lincah dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Berikut disampaikan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah, sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Yang Mencakup Terhadap Berbagai Aspek, Deregulasi, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakaat Terkait Akses Layanan Pemerintahan; Dan Pengembangan Wilayah Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Efektif, Transparan, Efisien Dan Taat Asas	Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik
Meningkatnya Pelayanan Pimpinan		Peningkatan Materi dan Informasi Pimpinan
		Peningkatan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Prima		Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi		Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan		Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Kebijakan Ekonomi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat Yang Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Peningkatan Administrasi Tata Pemerintahan Dalam Penyelengaran Otonomi Daerah

SASARAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Meningkatkan Kualitas Dan Penguatan Peran Kelembagaan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Melalui Kerja Sama Daerah Dan Pengendalian Pembangunan	Peningkatan Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Menyusun LKIP Perangkat Daerah Yang Berkualitas
Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan		Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta Dalam Meningkatkankesejahteraan Masyarakat
Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Birokrat Yang Berintegritas Dan Inovatif Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Cepat, Efektif, Transparan, Efisien Dan Taat Asas	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Budaya Kerja ASN		Peningkatan Pembinaan Asn Dalam Pelaksanaan Budaya Kerja ASN Berakhlak

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

3.5 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029

Program prioritas sebagaimana Permendagri No.90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, adapun Program Prioritas Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi						
Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
	Terwujudnya Kebijakan Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inklusif			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik Yang Berkelanjutan		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)		
			Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Dengan	4.01.02 Program Penataan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Pelayanan Publik	Nilai Ikm Minimal Sangat Baik (%)	Organisasi	
		Meningkatnya Pelayanan Pimpinan		Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Materi Dan Informasi Pimpinan	Persentase Layanan Materi Dan Informasi Pimpinan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	Persentase Kebutuhan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Pelayanan Sekretariat Daerah Yang Prima		Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Setda	Persentase Layanan Tata Usaha Setda Yang Terpenuhi Sesuai Standar		
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Setda	Persentase Layanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Setda Yang	4.01.01 Program Penunjang Urusan	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Terpenuhi Sesuai Standar (%)	Pemerintahan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Dan Rumah Tangga Pimpinan	Presentase Fasilitasi Rumah Tangga Pimpinan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	Terwujudnya Kebijakan Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inklusif			Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)		
		Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan Dan Regulasi		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitasi Layanan Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dan Ham Yang Terlayani Sesuai Standar (%)	4.01.05 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Produk Hukum	Persentase Fasilitasi Produk Hukum Yang Terlayani Sesuai Standar (%)	4.01.05 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi		Persentase Kebijakan Administrasi		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan		Pembangunan Yang Dimanfaatkan (%)		
			Meningkanya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan Yang Di Tindaklanjut (%)	4.01.08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan		Persentase Kebijakan Ekonomi Yang Dimanfaatkan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.06 Program Perekonomian Dan Pembangunan	
		Meningkatnya Hubungan Kerjasama Yang Diimplementasikan		Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi/Sister Province (Instansi)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentasi Kebijakan Penyeleggaraan Otonomi Daerah Yang Sesuai Regulasi (%)	4.01.03 Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
			Meningkatnya Kerja	Persentasi Kerja	4.01.03	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Sama Daerah Yang Diimplementasikan	Sama Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi (%)	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dimanfaatkan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bina Spiritual	Persentase Kebijakan Bina Spiritual Yang Dimanfaatkan Sesuai Reguliasi (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Dasar Dan Non Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Pelayanan Dasar Dan Non Pelayanan Dasar Yang Dimanfaatkan Sesuai Regulasi (%)	4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat	
	Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi Yang Berbasis Jejaring Dan Lincah Organisasi			Nilai Sakip/Sakp (Nilai)		
		Meningkatnya		Nilai Komponen		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaporan Kinerja Yang Informatif		Pelaporan Kinerja (Nilai)		
			Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelaporan Berkualitas	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelaporan Berkualitas (%)	4.01.02 Program Penataan Organisasi	
			Meningkatnya Hasil Penataan Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	4.01.02 Program Penataan Organisasi	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Regulasi (%)	4.01.03 Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
	Terbangunnya Perilaku Birokrasi Yang Beretika Dan Inovatif			Indeks Integritas Nasional (Persentase)		
		Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa (Nilai)		

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	4.01.07 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	
				Tingkat Kematangan Ukpbj (Angka)	4.01.07 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	
				Kualifikasi & Kompetensi Sdm Pbj (Nilai)	4.01.07 Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	
		Meningkatnya Budaya Kerja Asn		Indeks Asn Berakhlak (Nilai)		
			Budaya Kerja Diterapkan Secara Efektif Oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Budaya Kerja Minimal "Predikat Baik" (%)	4.01.02 Program Penataan Organisasi	
			Meningkatnya	Persentase	4.01.02	

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Predikat Baik" (%)	Program Penataan Organisasi	

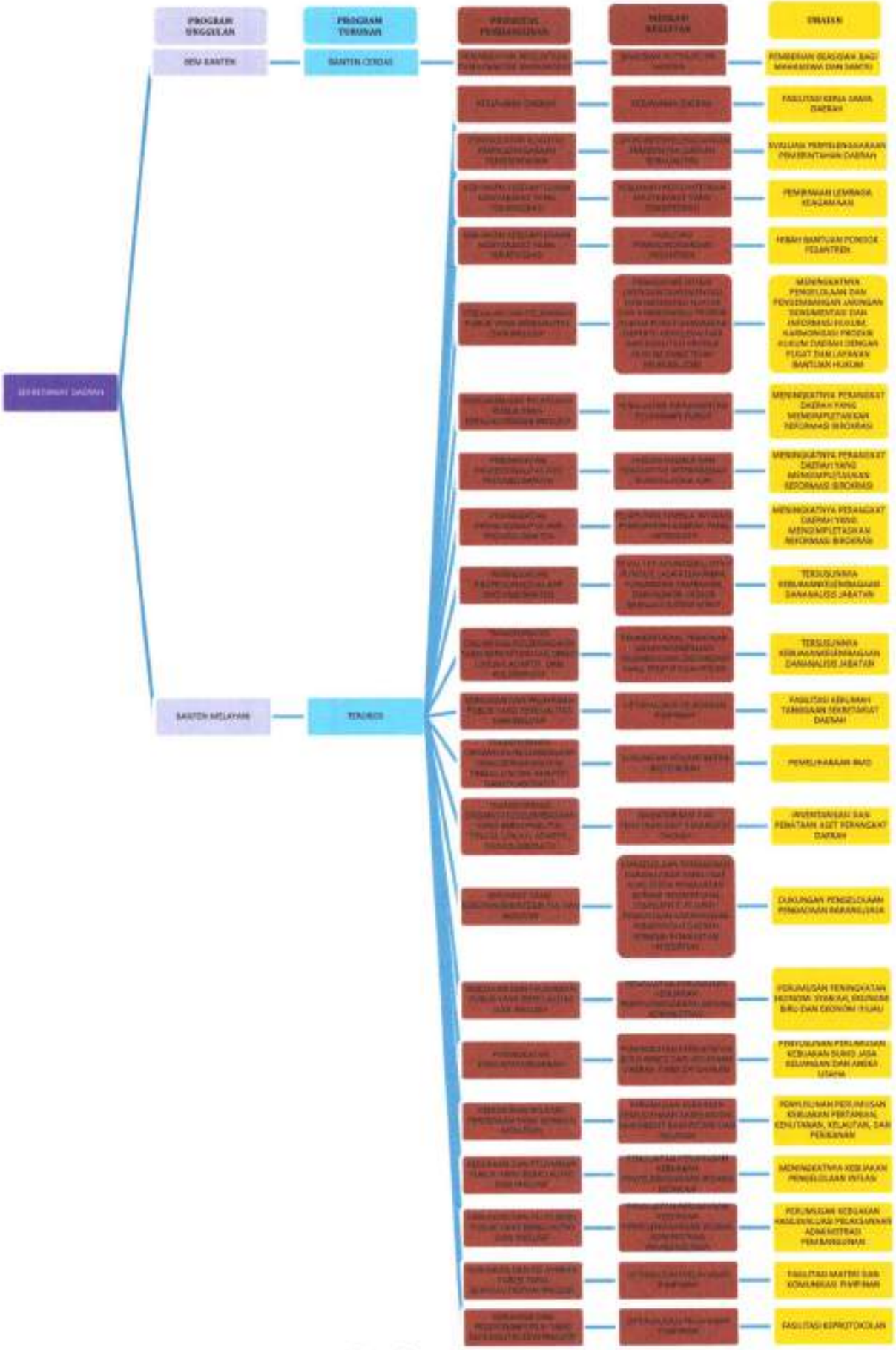
Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah

Memperhatikan muatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Khususnya Terhadap Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah yang diintervensi maka telah dirumuskan dengan memperhatikan casecading kinerja untuk mengejawantahkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan outcome yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya serta program prioritas dimaksud. Program unggulan dan program turunan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yaitu:

1. Program Unggulan 3 (tiga) Banten Cerdas, Sekolah Gratis Untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten, dimana di dalamnya terdapat program turunan BEM BANTEN (Beasiswa Masyarakat Banten).
2. Program Unggulan 8 (delapan) Banten Melayani, Tata Kelola Pemerintahan tidak korupsi dan Sistem Merit Dalam Birokrasi, dimana didalamnya terdapat program turunan TEROBOS (Transformasi dan Efisiensi Reformasi Birokrasi Optimal)

Berikut diagram alir intervensi dukungan program unggulan dan program turunan Kepala Daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten :



Gambar 3.1
Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029

(Sumber: Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten,2025)

Tabel 3.5
Rumusan Program Provinsi Banten berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KERJASAMA DAERAH	KERJASAMA DAERAH	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	5 KERJASAMA DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERKUALITAS	EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	5 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	5 LEMBAGA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN	HIBAH BANTUAN PONDOK PESANTREN	2 MILYAR
BANTEN CERDAS	BEM BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	BEASISWA PUTRA/PUTRI BANTEN	PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN SANTRI	2 MILYAR
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM PUSAT DANDAERAH (SEPERTI: REVIU,EVALUASI DAN FASILITASI PRODUK HUKUM YANG TIDAK RELEVAN, DSB)	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN PUSAT DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM	5 LAPORAN 5 DOKUMEN 50 KASUS
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITASDAN INKLUSIF	PENGUATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLETASIKAN	24 DOKUMEN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
				REFORMASI BIROKRASI	
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	DIALOG KINERJA DAN PENGUATAN INTERNALISASI BUDAYA KERJA ASN	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLETASIKAN REFORMASI BIROKRASI	61 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH YANG INFORMATIF	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLETASIKAN REFORMASI BIROKRASI	20 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	REVIU TPP AKUNTABEL, UPAH PUNGUT, JASA PELAYANAN, TUNJANGAN TAMBAHAN, DAN HONOR- HONOR BERBASIS SISTEM MERIT	TERSUSUNNYA KEBIJAKANKELEMBAGAAN DANANALISIS JABATAN	20 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMBENTUKAN, PENATAAN DANPENGENDALIAN KELEMBAGAAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	TERSUSUNNYA KEBIJAKANKELEMBAGAAN DANANALISIS JABATAN	20 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PELAYANAN PIMPINAN	FASILITASI KERUMAH TANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	5 LAPORAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DANKOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASETDAERAH	PEMELIHARAAN BMD	202 UNIT
BANTEN	TEROBOS	TRANSFORMASI	INVENTARISASI DAN PENATAAN	INVENTARISASI DAN	5 LAPORAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
MELAYANI		ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DANKOLABORATIF	ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	BIROKRAT YANG BERETIKA,BERINTEGRITAS DAN INOVATIF	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG TAAT ASAS SERTA PENGUATAN KONSEP INSENTIF DAN DISINSENTIF PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGUATAN INTEGRITAS	DUKUNGAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	73 SATKER
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG ADMINISTRASI	PERUMUSAN PENINGKATAN EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU DAN EKONOM IHIJAU	3 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATANDAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	PENYUSUNAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BUMD JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA	5 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEMAKIN MENURUN	PERUMUSAN KEBIJAKAN KEMUDAHAAN AKSES MODAL DAN KREDIT BAGI PETANI DAN NELAYAN	PENYUSUNAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	5 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG EKONOMI	MENINGKATNYA KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFLASI	5 DOKUMEN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN HASILEVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITASDAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PELAYANAN PIMPINAN	FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1 DOKUMEN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANANPUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PELAYANAN PIMPINAN	FASILITASI KEPROTOKOLAN	1 DOKUMEN

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Sub kegiatan merupakan bagian atau langkah-langkah terperinci dari sebuah kegiatan yang lebih besar, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sub kegiatan ini seringkali merupakan komponen-komponen yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan utama dan dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan memastikan keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

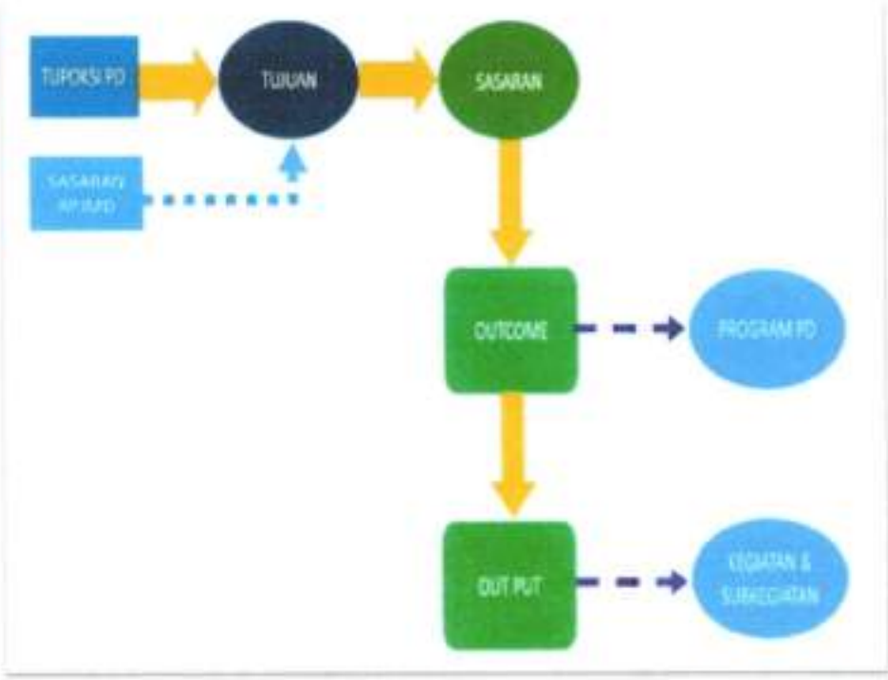
Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 Program yang digunakan pada Rencana Strategis yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Program Kesejahteraan Rakyat
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
5. Program Perekonomian dan Pembangunan
6. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
7. Program Penataan Organisasi
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD

dan Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD
Sumber : Inmendagri Nomor 2, 2025

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
4.01.0.00.0.00.01.0001Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Diimplementasikan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kerja Sama Daerah Yang		Persentasi Kerja Sama Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai	4.01.03PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Diimplementasikan		Regulasi (%)		
				Meningkatnya kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0001Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0002Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03.0003Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya	Jumlah Laporan	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				pelayanan penunjang kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bina Spiritual		Persentase Kebijakan Bina Spiritual yang Dimanfaatkan Sesuai Regulasi (%)	4.01.04PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Optimalnya fasilitasi pembinaan mental spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01.0001Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
					Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01.0002Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
			Meningkatnya Kualitas kebijakan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Persentase kebijakan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan sesuai regulasi (%)	4.01.04PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	4.01.04.1.02Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	4.01.04.1.02Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi	4.01.04.1.02.0001Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	4.01.04.1.02.0002Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02.0003Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
				Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	4.01.04.1.03Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	4.01.04.1.03Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.04.1.03Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4.01.04.1.03.0001Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.04.1.03.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	4.01.04.1.03.0003Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	
Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah Organisasi	Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah Organisasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SSPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SSPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut PemeGasaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terfasilitasinya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas administrasi tata Pemerintahan		Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Regulasi (%)	4.01.03PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01.0001Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4.01.03.1.01.0002Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01.0003Fasilitasi Perataan Wilayah	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Persentasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Sesuai Regulasi (%)	4.01.03PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Optimalnya penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Perataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil	4.01.03.1.02Pelaksanaan Otonomi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02.0001Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02.0002Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4.01.03.1.02.0003Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
4.01.0.00.0.00.01.0002Biro Hukum							
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif\	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					(Laporan)	Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					meseteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya Pelayanan Penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas layanan produk hukum		Persentase Fasilitasi Produk Hukum yang terlayani Sesuai Standar (%)	4.01.05PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
				Meningkatny a Kualitas Layanan Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0001Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0002Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
				Meningkatny a Kualitas Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01.0003Perodokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
				Meningkatny a Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01.0004Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Layanan		Persentase Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan HAM yang	4.01.05PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Bantuan Hukum		terlayani Sesuai Standar (%)		
				Meningkatnya Penanganan Perkara	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0001Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
				Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0002Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
4.01.0.00.0.00.01.0003Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi							
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya kepatuhan implementasi Standar Pelayanan Publik yang berkelanjutan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.1.05.0001Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya		Persentase Perangkat	4.01.02PROGRAM PENATAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pecerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik		Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal Sangat Baik (%)	ORGANISASI	
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02.0006Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02.0005Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah Organisasi	Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan Lincah Organisasi	Meningkatnya Pelaporan Kinerja yang Informatif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.1.05.0001Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksanya	Jumlah Dokumen	4.01.01.1.06Administrasi Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terfasilitasinya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Hasil		Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	4.01.02PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penataan Kelembagaan				
				Terwujudnya Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0001Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0002Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01.0003Penataan Analisis Jabatan	
			Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas (%)	4.01.02PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimpletasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02.0002Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif	Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif	Meningkatnya Budaya Kerja ASN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	

SSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	4.01.01.1.05.0001Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraa	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi		Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Predikat Baik" (%)	4.01.02PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02.0001Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			Budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja minimal "Predikat Baik" (%)	4.01.02PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02.0003Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
4.01.0.00.0.00.01.0006Biro Umum dan Perlengkapan							
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Daerah yang Prima	pada Perangkat Daerah				
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05.0011Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Setda		Persentase Layanan Tata Usaha Setda yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	

SSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.1.06.0006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.1.08.0001Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Fasilitasi Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan		Presentase Fasilitasi Rumah Tangga Pimpinan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terpenuhinya layanan administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan aturan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.11Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.1.11.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	4.01.01.1.11.0002Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.1.11.0003Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11.0004Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terpenuhinya Layanan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan sesuai Regulasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0001Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0002Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0003Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda		Persentase Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda yang terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terwujudnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.1.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kombinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0001Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.03.0002Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0005Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Setda Sesuai Regulasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.07.0005Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.1.07.0010Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Setda Sesuai Regulasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertainannya (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertainannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0005Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0005Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0010Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0011Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.01.0.00.0.00.01.0007Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							
- Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif	- Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terwujudnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.1.05.0010Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan	4.01.01.1.06Administrasi Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.1.06.0006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	4.01.07PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
					Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	4.01.07PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
					Tingkat Kematangan UKPBJ ()	4.01.07PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				Terkelolanya Pengadaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan	4.01.07.1.01Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Barang dan Jasa Sesuai Regulasi	Barang dan Jasa (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0001Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0002Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0003Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02.0001Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0002Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0003Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pembinaan SDM, Kapasitas Kelembagaan,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis	4.01.07.1.03Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03.0001Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0002Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0003Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.0.00.0.00.01.0008Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan							
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RSA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup	4.01.01.1.01.0008Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Perangkat Daerah (Data)		
				Terlaksanany a Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatny	Jumlah Dokumen	4.01.01.1.05Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				a Prestasi Kinerja ASN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0003Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terkelolanya Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjut (%)	4.01.08PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
				Tersusunnya Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4.01.08.1.01Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	4.01.08.1.01Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01.0001Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	4.01.08.1.01.0002Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	4.01.08.1.01.0003Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	Pembangunan Wilayah	
				Terwujudnya Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	4.01.08.1.02Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.08.1.02Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	4.01.08.1.02.0001Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02.0002Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.08.1.02.0003Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik	4.01.01.1.01.0008Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terwujudnya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0003Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0003Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	

MSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Konsultasi SKPD (Laporan)	Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terkelolanya Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	4.01.06PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Tersusunnya Kebijakan Perekonomian Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	4.01.06.1.01Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0001Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0002Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
				Tersusunnya Kebijakan Sumber Daya Alam Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	4.01.06.1.02Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	4.01.06.1.02Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02.0001Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	4.01.06.1.02.0002Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Terwujudnya Kebijakan BUMD dan BLUD Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	4.01.06.1.03Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	4.01.06.1.03Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03.0001Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	4.01.06.1.03.0002Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum	4.01.06.1.03.0004Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Daerah (Dokumen)		
4.01.0.00.0.00.01.0009Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol							
Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Meningkatnya Pelayanan Pimpinan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4.01.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Daerah (Dokumen)	Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.1.01.0008Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.1.01.0009Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi/	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0004Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4.01.01.1.02.0006Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.1.02.0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.1.02.0008Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatny a Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	4.01.01.1.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	

SSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Kelengkapan (Paket)	Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0003Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.1.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0010Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terkelolanya Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Materi dan Informasi		Persentase Layanan Materi dan Informasi Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pimpinan				
				Terpenuhinya Kebutuhan Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13.0001Penyiapan Materi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0002Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0003Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan		Persentase Kebutuhan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	4.01.01PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terpenuhinya Fasilitasi Acara, Kunjungan Tamu dan Hubungan Keprotokolan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	4.01.01.1.14Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	4.01.01.1.14.0001Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14.0002Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14.0003Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Beserta Target Dan Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				312.341.014.687		321.269.780.000		330.389.449.000		341.774.371.000		350.173.088.000
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				283.399.768.042		288.584.359.000		296.734.218.000		303.062.823.000		310.574.645.000
Meningkatnya Fasilitasi Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan	Presentase Fasilitasi Rumah Tangga Pimpinan Yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	36.494.972.000	100	36.894.972.000	100	37.294.972.000	100	37.844.972.000	100	38.100.972.000
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				19.494.972.000		19.594.972.000		19.694.972.000		19.794.972.000		19.900.972.000
Terpenuhinya layanan administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan aturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	4	19.494.972.000	4	19.594.972.000	4	19.694.972.000	4	19.794.972.000	4	19.900.972.000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2		2		2		2		2	
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				15.120.000.000		15.120.000.000		15.120.000.000		15.120.000.000		15.126.000.000
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	1	2	15.120.000.000	2	15.120.000.000	2	15.120.000.000	2	15.120.000.000	2	15.126.000.000
4.01.01.1.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.134.972.000		1.134.972.000		1.134.972.000		1.134.972.000		1.134.972.000
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	1.134.972.000	1	1.134.972.000	1	1.134.972.000	1	1.134.972.000	1	1.134.972.000
4.01.01.1.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000	4	240.000.000
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.000.000.000		3.100.000.000		3.200.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	3.000.000.000	2	3.100.000.000	2	3.200.000.000	2	3.300.000.000	2	3.400.000.000
4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				17.000.000.000		17.300.000.000		17.600.000.000		18.050.000.000		18.200.000.000
Terpenuhinya Layanan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan sesuai Regulasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	17.000.000.000	1	17.300.000.000	1	17.600.000.000	1	18.050.000.000	1	18.200.000.000
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				7.000.000.000		7.100.000.000		7.200.000.000		7.350.000.000		7.400.000.000
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	7.000.000.000	1	7.100.000.000	1	7.200.000.000	1	7.350.000.000	1	7.400.000.000
4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				6.000.000.000		6.100.000.000		6.200.000.000		6.350.000.000		6.400.000.000
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000.000	1	6.100.000.000	1	6.200.000.000	1	6.350.000.000	1	6.400.000.000
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				4.000.000.000		4.100.000.000		4.200.000.000		4.350.000.000		4.400.000.000
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000.000	1	4.100.000.000	1	4.200.000.000	1	4.350.000.000	1	4.400.000.000
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	Persentase Kebutuhan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	2.700.000.000	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000	100	2.950.000.000
4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan				2.700.000.000		2.800.000.000		2.900.000.000		2.900.000.000		2.950.000.000
Terpenuhinya Fasilitasi Acara, Kunjungan Tamu dan Hubungan Keprotokolan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	12	12	2.700.000.000	12	2.800.000.000	12	2.900.000.000	12	2.900.000.000	12	2.950.000.000
	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	12	12	1.050.000.000	12	1.100.000.000	12	1.150.000.000	12	1.150.000.000	12	1.150.000.000
4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				800.000.000		830.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	12	800.000.000	12	830.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000	12	900.000.000
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				850.000.000		870.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	12	12	850.000.000	12	870.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000
Meningkatnya Kualitas Layanan Materi dan Informasi Pimpinan	Persentase Layanan Materi dan Informasi Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	4.488.800.000	100	4.600.000.000	100	4.730.000.000	100	4.830.000.000	100	5.000.000.000
4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				4.488.800.000		4.600.000.000		4.730.000.000		4.830.000.000		5.000.000.000
Terpenuhinya Kebutuhan Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	4.488.800.000	12	4.600.000.000	12	4.730.000.000	12	4.830.000.000	12	5.000.000.000
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan				820.000.000		850.000.000		880.000.000		880.000.000		900.000.000
Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	12	12	820.000.000	12	850.000.000	12	880.000.000	12	880.000.000	12	900.000.000
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1.858.800.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	1.858.800.000	12	1.900.000.000	12	1.950.000.000	12	2.000.000.000	12	2.100.000.000
4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1.810.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	12	12	1.810.000.000	12	1.850.000.000	12	1.900.000.000	12	1.950.000.000	12	2.000.000.000
Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Setda	Persentase Layanan Tata Usaha Setda yang Terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	33.954.281.400	100	34.452.588.750	100	35.126.740.750	100	35.838.117.750	100	36.663.894.750
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.038.402.000		14.702.589.000		15.145.000.000		15.580.000.000		16.200.000.000
Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	14.038.402.000	1	14.702.589.000	1	15.145.000.000	1	15.580.000.000	1	16.200.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	SKPD (Laporan)											
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				464.500.000		500.000.000		550.000.000		560.000.000		570.000.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	464.500.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	560.000.000	1	570.000.000
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.150.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				219.071.000		230.000.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	219.071.000	1	230.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.500.000.000		2.622.589.000		2.650.000.000		2.660.000.000		2.700.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.500.000.000	1	2.622.589.000	1	2.650.000.000	1	2.660.000.000	1	2.700.000.000
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				800.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.000.000.000		7.100.000.000		7.200.000.000		7.300.000.000		7.500.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	7.000.000.000	1	7.100.000.000	1	7.200.000.000	1	7.300.000.000	1	7.500.000.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.600.000.000	1	1.700.000.000	1	1.800.000.000
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				514.831.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	514.831.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.515.879.400		19.749.999.750		19.981.740.750		20.258.117.750		20.465.894.750
Terlelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	19.515.879.400	1	19.749.999.750	1	19.981.740.750	1	20.258.117.750	1	20.465.894.750
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				230.000.000		250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	230.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.406.405.000		3.499.999.750		3.521.740.750		3.588.117.750		3.635.894.750
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.406.405.000	1	3.499.999.750	1	3.521.740.750	1	3.588.117.750	1	3.635.894.750

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.379.474.400		2.400.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.700.000.000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.379.474.400	1	2.400.000.000	1	2.500.000.000	1	2.600.000.000	1	2.700.000.000
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.500.000.000		13.600.000.000		13.700.000.000		13.800.000.000		13.850.000.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	13.500.000.000	1	13.600.000.000	1	13.700.000.000	1	13.800.000.000	1	13.850.000.000
Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda	Persentase Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda yang terpenuhi Sesuai Standar (%)	100	100	195.362.382.746	100	198.843.338.250	100	204.487.308.250	100	210.102.157.250	100	216.016.936.250
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				170.860.178.816		173.779.358.000		178.459.328.000		183.282.177.000		188.308.956.000
Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	170.860.178.816	3	173.779.358.000	3	178.459.328.000	3	183.282.177.000	3	188.308.956.000
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	344	344		344		344		344		344	
4.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				168.445.308.816		171.198.788.000		175.856.758.000		180.631.177.000		185.518.956.000
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	344	344	168.445.308.816	344	171.198.788.000	344	175.856.758.000	344	180.631.177.000	344	185.518.956.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.125.470.000		2.279.070.000		2.289.070.000		2.300.000.000		2.400.000.000
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	2.125.470.000	1	2.279.070.000	1	2.289.070.000	1	2.300.000.000	1	2.400.000.000
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				239.400.000		245.000.000		246.000.000		250.000.000		260.000.000
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	239.400.000	2	245.000.000	2	246.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		12.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000		35.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	15.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.000.000		2.000.000		3.000.000		5.000.000		10.000.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		22.000.000		25.000.000		35.000.000		45.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	20.000.000	3	22.000.000	3	25.000.000	3	35.000.000	3	45.000.000
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.000.000		3.500.000		4.500.000		6.000.000		10.000.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.500.000	1	6.000.000	1	10.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Anggaran	Anggaran (Dokumen)											
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				117.000.000		127.000.000		138.000.000		175.000.000		192.000.000
Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Setda Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	117.000.000	1	127.000.000	1	138.000.000	1	175.000.000	1	192.000.000
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		35.000.000		38.000.000		40.000.000		42.000.000
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	30.000.000	2	35.000.000	2	38.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000
4.01.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		42.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000
4.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		12.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000
Terlaksanannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				37.000.000		38.000.000		40.000.000		60.000.000		65.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	37.000.000	1	38.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
4.01.01.1.07 - Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.980.820.250		4.180.820.250		4.380.820.250		4.580.820.250		4.780.820.250
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Setda Sesuai Regulasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	436	436	3.980.820.250	440	4.180.820.250	500	4.380.820.250	500	4.580.820.250	510	4.780.820.250
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Sarana dan	1	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)											
4.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000
4.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.700.000.000		2.800.000.000		2.900.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	436	436	2.700.000.000	440	2.800.000.000	500	2.900.000.000	500	3.000.000.000	510	3.100.000.000
4.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.820.250		80.820.250		80.820.250		80.820.250		80.820.250
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	80.820.250	1	80.820.250	1	80.820.250	1	80.820.250	1	80.820.250
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.404.383.680		20.736.160.000		21.509.160.000		22.064.160.000		22.735.160.000
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Setda Sesuai Regulasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	20.404.383.680	25	20.736.160.000	25	21.509.160.000	25	22.064.160.000	25	22.735.160.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	5		5		5		5		5	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	5		5		5		5		5	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	392	300		300		300		300		300	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	87	100		100		100		100		100	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	113	172		180		190		200		200	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	5		5		5		5		5	
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.532.048.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	1.532.048.000	25	1.600.000.000	25	1.700.000.000	25	1.800.000.000	25	1.900.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASSLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	e	if	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.500.000.000		5.600.000.000		5.700.000.000		5.800.000.000		5.900.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	113	172	5.500.000.000	180	5.600.000.000	190	5.700.000.000	200	5.800.000.000	200	5.900.000.000
4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				90.000.000		92.000.000		95.000.000		100.000.000		200.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	87	100	90.000.000	100	92.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.150.493.680		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	392	300	1.150.493.680	300	1.200.000.000	300	1.300.000.000	300	1.400.000.000	300	1.500.000.000
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.300.000.000		3.400.000.000		3.450.000.000		3.500.000.000		3.600.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	5	3.300.000.000	5	3.400.000.000	5	3.450.000.000	5	3.500.000.000	5	3.600.000.000
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.467.682.000		8.500.000.000		8.600.000.000		8.700.000.000		8.750.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	5	8.467.682.000	5	8.500.000.000	5	8.600.000.000	5	8.700.000.000	5	8.750.000.000
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				364.160.000		364.160.000		664.160.000		764.160.000		885.160.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	364.160.000	5	364.160.000	5	664.160.000	5	764.160.000	5	885.160.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	59,88	80	10.799.331.896	83	10.993.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.576.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		12		12		12		12		12	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1	
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)											
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5		5		5		5		5	
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		85	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000
Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12	
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	59,88	80	10.799.331.896	83	10.993.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.576.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.175.000		28.175.000		28.175.000		28.175.000		28.175.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	28.175.000	1	28.175.000	1	28.175.000	1	28.175.000	1	28.175.000
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.100.000		13.100.000		13.100.000		13.100.000		13.100.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	1	13.100.000	1	13.100.000	1	13.100.000	1	13.100.000	1	13.100.000

SUBIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.575.000		2.575.000		2.575.000		2.575.000		2.575.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.575.000	1	2.575.000	1	2.575.000	1	2.575.000	1	2.575.000
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
Terselenggaranya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1				1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.500.000		1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
4.01.01.1.02.0006 - Pengkajian dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.150.000
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	1.350.000	3	1.350.000	3	1.350.000	3	1.350.000	3	1.350.000
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.750.000		30.750.000		30.750.000		30.750.000		30.750.000
Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	30.750.000	4	30.750.000	4	30.750.000	4	30.750.000	4	30.750.000
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.750.000		30.750.000		30.750.000		30.750.000		30.750.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	30.750.000	4	30.750.000	4	30.750.000	4	30.750.000	4	30.750.000
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				310.145.925		302.995.000		317.807.000		332.991.000		348.554.000
Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	310.145.925	1	302.995.000	1	317.807.000	1	332.991.000	1	348.554.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112.663.925		115.000.000		120.000.000		125.000.000		135.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	112.663.925	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	135.000.000
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				84.090.000		85.000.000		90.000.000		97.991.000		102.554.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	84.090.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	97.991.000	1	102.554.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.392.000		102.995.000		107.807.000		110.000.000		111.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	113.392.000	1	102.995.000	1	107.807.000	1	110.000.000	1	111.000.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				204.998.000		226.601.000		226.602.000		226.601.000		226.601.000
Terlaksanya Pelayanan Penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	204.998.000	1	226.601.000	1	226.602.000	1	226.601.000	1	226.601.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000	1	1.300.000
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				203.698.000		225.301.000		225.302.000		225.301.000		225.301.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	203.698.000	1	225.301.000	1	225.302.000	1	225.301.000	1	225.301.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	59,88	80	10.799.331.896	83	10.993.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.376.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.200.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	43.200.000	1	50.400.000	1	50.400.000	1	50.400.000	1	50.400.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	(Dokumen)											
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.800.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	28.800.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000
Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	0									
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	0	0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeseran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.430.000		46.700.000		46.700.000		46.700.000		46.700.000
Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	44.430.000	1	46.700.000	1	46.700.000	1	46.700.000	1	46.700.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3		3		3		3		3	
4.01.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6.700.000		6.700.000		6.700.000		6.700.000		6.700.000
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	6.700.000	1	6.700.000	1	6.700.000	1	6.700.000	1	6.700.000
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				37.730.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	2	37.730.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				91.879.402		95.634.000		109.190.000		109.190.000		109.190.000
Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	91.879.402	1	95.634.000	1	109.190.000	1	109.190.000	1	109.190.000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1										
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000		60.000.000		68.300.000		68.300.000		68.300.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	68.300.000	1	68.300.000	1	68.300.000
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0		0
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.979.402		6.734.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.979.402	1	6.734.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.500.000		16.500.000		19.490.000		19.490.000		19.490.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	16.500.000	1	16.500.000	1	19.490.000	1	19.490.000	1	19.490.000
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330.294.000		330.294.000		330.294.000		344.189.000		358.431.000
Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	330.294.000	13	330.294.000	13	330.294.000	13	344.189.000	13	358.431.000
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				330.294.000		330.294.000		330.294.000		344.189.000		358.431.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	330.294.000	13	330.294.000	13	330.294.000	13	344.189.000	13	358.431.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	50,88	80	10.799.331.896	83	10.963.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.576.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		174.000.000		190.000.000		217.000.000		283.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	150.000.000	1	174.000.000	1	190.000.000	1	217.000.000	1	283.000.000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	3		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	3		3		3		3		3	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000		35.000.000		37.000.000		40.000.000		50.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	3	30.000.000	3	35.000.000	3	37.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				19.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		40.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	19.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				19.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		40.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	1	19.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				12.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				12.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000		30.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				28.000.000		30.000.000		32.000.000		32.000.000		40.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	1	28.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	40.000.000
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		35.000.000		37.000.000		45.000.000		55.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	3	30.000.000	3	35.000.000	3	37.000.000	3	45.000.000	3	55.000.000
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				195.000.000		200.000.000		230.000.000		260.000.000		300.000.000
Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14	35	195.000.000	35	200.000.000	35	230.000.000	35	260.000.000	35	300.000.000
4.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan				195.000.000		200.000.000		230.000.000		260.000.000		300.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Perundang-Undangan												
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14	35	195.000.000	35	200.000.000	35	230.000.000	35	260.000.000	35	300.000.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	59,88	80	10.799.331.896	83	10.993.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.576.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78.773.000		78.773.000		80.000.000		110.000.000		140.000.000
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	78.773.000	1	78.773.000	1	80.000.000	1	110.000.000	1	140.000.000
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	16		16		16		16		16	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	5		5		5		5		5	
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.810.000		15.810.000		16.000.000		17.000.000		25.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	15.810.000	2	15.810.000	2	16.000.000	2	17.000.000	2	25.000.000
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.620.000		9.620.000		10.237.000		11.000.000		15.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RSA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	9.620.000	1	9.620.000	1	10.237.000	1	11.000.000	1	15.000.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				10.250.000		10.250.000		10.250.000		12.000.000		18.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Perubahan RKA-SKPD												
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	10.250.000	1	10.250.000	1	10.250.000	1	12.000.000	1	18.000.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.580.000		5.580.000		6.000.000		6.650.000		8.000.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	5.580.000	1	5.580.000	1	6.000.000	1	6.650.000	1	8.000.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				6.630.000		6.630.000		6.630.000		7.000.000		9.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	6.630.000	1	6.630.000	1	6.630.000	1	7.000.000	1	9.000.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.234.000		20.234.000		20.234.000		36.350.000		40.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	16	20.234.000	16	20.234.000	16	20.234.000	16	36.350.000	16	40.000.000
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.649.000		10.649.000		10.649.000		20.000.000		23.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	5	10.649.000	5	10.649.000	5	10.649.000	5	20.000.000	5	25.000.000
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000
Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	10.500.000	12	10.500.000	12	10.500.000	12	10.500.000	12	10.500.000
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18	18		18		18		18		18	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	SKPD (Laporan)											
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.150.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000		2.150.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.150.000	1	2.150.000
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	5.250.000	18	5.250.000	18	5.250.000	18	5.250.000	18	5.250.000
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				160.000.000		134.572.000		184.572.000		170.199.000		170.199.000
Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	25	160.000.000	30	134.572.000	35	184.572.000	40	170.199.000	45	170.199.000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	240		240		240		240		240	
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan				100.000.000		100.000.000		130.000.000		135.627.000		135.627.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	25	100.000.000	30	100.000.000	35	150.000.000	40	135.627.000	45	135.627.000
4.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60.000.000		34.572.000		34.572.000		34.572.000		34.572.000
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	240	60.000.000	240	34.572.000	240	34.572.000	240	34.572.000	240	34.572.000
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				866.177.359		919.492.000		896.849.000		910.525.000		910.567.000
Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	866.177.359	12	919.492.000	12	896.849.000	12	910.525.000	12	910.567.000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				350.377.359		339.092.000		316.449.000		330.125.000		330.167.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	350.377.359	1	339.092.000	1	316.449.000	1	330.125.000	1	330.167.000
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	70.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000		70.400.000		70.400.000		70.400.000		70.400.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	70.000.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000
4.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				26.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	25.800.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162.000.000		166.050.000		170.200.000		174.450.000		178.800.000
Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	162.000.000	12	166.050.000	12	170.200.000	12	174.450.000	12	178.800.000
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				162.000.000		166.050.000		170.200.000		174.450.000		178.800.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	162.000.000	12	166.050.000	12	170.200.000	12	174.450.000	12	178.800.000
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	59,88	80	10.799.331.896	83	10.993.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.576.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71.070.000		75.120.000		79.120.000		83.120.000		87.120.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 Laporan	4 Laporan	71.070.000	4 Laporan	75.120.000	4 Laporan	79.120.000	4 Laporan	83.120.000	4 Laporan	87.120.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1 Data		1 Data		1 Data		1 Data		1 Data	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12 laporan	16 laporan		16 laporan		16 laporan		16 laporan		16 laporan	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000		25.500.000		26.000.000		26.500.000		27.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.500.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	26.500.000	2 Dokumen	27.000.000
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.000.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	9.000.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	9.000.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.620.000		7.120.000		7.620.000		8.120.000		8.620.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12 laporan	16 laporan	6.620.000	16 laporan	7.120.000	16 laporan	7.620.000	16 laporan	8.120.000	16 laporan	8.620.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.500.000	4 Laporan	11.000.000	4 Laporan	11.500.000	4 Laporan	12.000.000
4.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				4.430.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1 Data	4.430.000	1 Data	5.000.000	1 Data	5.500.000	1 Data	6.000.000	1 Data	6.500.000
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.860.000		21.360.000		28.284.000		26.360.000		29.669.600
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	18.860.000	1 Laporan	21.360.000	1 Laporan	28.284.000	1 Laporan	26.360.000	1 Laporan	29.669.600
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1 Laporan	18 Laporan		18 Laporan		18 Laporan		18 Laporan		18 Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.798.400		6.298.400		11.222.400		7.298.400		8.608.000
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.798.400	1 Dokumen	6.298.400	1 Dokumen	11.222.400	1 Dokumen	7.298.400	1 Dokumen	8.608.000
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				809.600		1.309.600		1.809.600		2.309.600		2.809.600
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	809.600	1 Laporan	1.309.600	1 Laporan	1.809.600	1 Laporan	2.309.600	1 Laporan	2.809.600
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4.424.000		4.924.000		5.424.000		5.924.000		6.424.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.424.000	1 Dokumen	4.924.000	1 Dokumen	5.424.000	1 Dokumen	5.924.000	1 Dokumen	6.424.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)											
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5.508.000		6.008.000		6.508.000		7.008.000		7.508.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1 Laporan	18 Laporan	5.508.000	18 Laporan	6.008.000	18 Laporan	6.508.000	18 Laporan	7.008.000	18 Laporan	7.508.000
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.320.000		2.820.000		3.320.000		3.820.000		4.320.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.320.000	1 Dokumen	2.820.000	1 Dokumen	3.320.000	1 Dokumen	3.820.000	1 Dokumen	4.320.000
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000
Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	37.000.000	1 Dokumen	38.000.000	1 Dokumen	39.000.000
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4		4		4		4		4	
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.500.000	1 Dokumen	12.000.000
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		25.500.000		26.000.000		26.500.000		27.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	4	25.000.000	4	25.500.000	4	26.000.000	4	26.500.000	4	27.000.000
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				199.864.470		257.347.470		361.511.470		600.286.470		642.619.870
Terselenggara Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	199.864.470	1 Paket	257.347.470	1 Paket	361.511.470	1 Paket	600.286.470	1 Paket	642.619.870
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Disediakan (Paket)											
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		118.114.983		201.537.000		202.037.000		207.537.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	90.000.000	1 Paket	118.114.983	1 Paket	201.537.000	1 Paket	202.037.000	1 Paket	207.537.000
4.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.097.000		15.597.000		16.097.000		16.597.000		17.097.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	15.097.000	1 Paket	15.597.000	1 Paket	16.097.000	1 Paket	16.597.000	1 Paket	17.097.000
4.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		46.700.000		47.200.000		60.000.000		150.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	46.700.000	1 Paket	47.200.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	150.000.000
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.552.470		36.220.487		55.462.470		60.000.000		70.000.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	24.552.470	1 Paket	36.220.487	1 Paket	55.462.470	1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.500.000		41.000.000		261.437.470		197.770.870
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.500.000	1 Laporan	41.000.000	1 Laporan	261.437.470	1 Laporan	197.770.870
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				215.000		215.000		215.000		215.000		215.000
Terlaksanannya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	215.000	1 Dokumen	215.000	1 Dokumen	215.000	1 Dokumen	215.000	1 Dokumen	215.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.138.094.322		1.109.633.530		1.031.032.530		827.604.530		816.346.530
Terlebihnya Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	0 Dokumen	1.138.094.322	0 Dokumen	1.109.633.530	0 Dokumen	1.031.032.530	0 Dokumen	827.604.530	0 Dokumen	816.346.530
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Air dan Listrik												
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.138.094.322		1.109.633.530		1.031.032.530		827.604.530		816.346.530
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	1.138.094.322	12 Laporan	1.109.633.530	12 Laporan	1.031.032.530	12 Laporan	827.604.530	12 Laporan	816.346.530
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	59,88	80	10.799.331.896	83	10.993.460.000	85	11.195.197.000	87	11.547.576.000	90	11.840.842.000
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				632.000.000		634.500.000		637.000.000		639.500.000		639.500.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	632.000.000	2	634.500.000	2	637.000.000	2	639.500.000	2	639.500.000
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	16		16		16		16		16	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	0	1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Daerah (Dana)											
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000
4.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	8.000.000	2	8.500.000	2	9.000.000	2	9.500.000	2	9.500.000
4.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	8.000.000	2	8.500.000	2	9.000.000	2	9.500.000	2	9.500.000
4.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	8.000.000	2	8.500.000	2	9.000.000	2	9.500.000	2	9.500.000
4.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	8.000.000	2	8.500.000	2	9.000.000	2	9.500.000	2	9.500.000
4.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	16	350.000.000	16	350.000.000	16	350.000.000	16	350.000.000	16	350.000.000
4.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000
4.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000		16.500.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksanannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	16.500.000
4.01.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Terlaksanannya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				59.998.000		67.000.000		71.500.000		76.000.000		79.500.000
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	59.998.000	1	67.000.000	1	71.500.000	1	76.000.000	1	79.500.000
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12	
4.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				9.900.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000
Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	9.900.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000	12	15.000.000
4.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.700.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.700.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
SKPD	(Laporan)											
4.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4.890.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	4.890.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000
4.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				37.000.000		40.000.000		42.000.000		44.000.000		45.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	37.000.000	18	40.000.000	18	42.000.000	18	44.000.000	18	45.000.000
4.01.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.508.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	2.508.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.413.974.000		1.430.000.000		1.450.000.000		1.490.000.000		1.510.000.000
Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1.413.974.000	1	1.430.000.000	1	1.450.000.000	1	1.490.000.000	1	1.510.000.000
	Jumlah Dokumen Perelatan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	26	10		10		10		10		10	
4.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
4.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				203.290.000		210.000.000		220.000.000		240.000.000		250.000.000
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	203.290.000	12	210.000.000	12	220.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000
4.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				210.684.000		220.000.000		230.000.000		250.000.000		260.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang	26	10	210.684.000	10	220.000.000	10	230.000.000	10	250.000.000	10	260.000.000
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.210.948.418		1.254.363.000		1.284.510.000		1.431.835.000		1.490.019.000
Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		4	1.210.948.418	4	1.254.363.000	4	1.284.510.000	4	1.431.835.000	4	1.490.019.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4		4		4		4		4	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12		12		12		12		12	
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				461.998.418		456.087.000		420.501.000		458.955.000		479.004.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	461.998.418	12	456.087.000	12	420.501.000	12	458.955.000	12	479.004.000
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				217.536.000		258.276.000		294.009.000		342.880.000		366.015.000
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	217.536.000	4	238.276.000	4	294.009.000	4	342.880.000	4	366.015.000
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				396.284.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000		460.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	396.284.000	12	400.000.000	12	420.000.000	12	450.000.000	12	460.000.000
4.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				135.130.000		140.000.000		150.000.000		180.000.000		185.000.000
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		4	135.130.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	180.000.000	4	185.000.000
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000
Terkelolanya Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2.152.252.000		2.860.725.000		3.025.200.000		3.367.858.000		3.439.611.000
Budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja minimal "Predikat Baik" (%)	75,8	76,5	200.000.000	77	250.725.000	77,5	300.000.000	78	400.000.000	81	400.000.000
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.352.252.000		1.800.725.000		1.925.200.000		2.187.858.000		2.189.611.000
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	2	2	200.000.000	2	250.725.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				200.000.000		250.725.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	2	2	200.000.000	2	250.725.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000
Meningkatnya Hasil Penataan Kelembagaan	Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	84,02	84,1	800.000.000	84,1	1.060.000.000	84,2	1.100.000.000	84,2	1.180.000.000	84,3	1.250.000.000
4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				800.000.000		1.060.000.000		1.100.000.000		1.180.000.000		1.250.000.000
Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4	4	800.000.000	4	1.060.000.000	4	1.100.000.000	4	1.180.000.000	4	1.250.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				300.000.000		400.000.000		400.000.000		450.000.000		480.000.000
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	480.000.000
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				200.000.000		280.000.000		300.000.000		310.000.000		350.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	280.000.000	2	300.000.000	2	310.000.000	2	350.000.000
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				300.000.000		380.000.000		400.000.000		420.000.000		420.000.000
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4	4	300.000.000	4	380.000.000	4	400.000.000	4	420.000.000	4	420.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal Sangat Baik (%)	94,01	94,04	577.252.000	94,06	770.000.000	94,08	775.200.000	94,1	867.858.000	94,12	869.611.000
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.352.252.000		1.800.725.000		1.925.200.000		2.187.858.000		2.189.611.000
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimpletasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	6	6	577.252.000	6	770.000.000	6	775.200.000	6	867.858.000	6	869.611.000
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	5	5		5		5		5		5	
4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				275.000.000		350.000.000		355.200.000		417.858.000		419.611.000
Terlaksanannya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	6	6	275.000.000	6	350.000.000	6	355.200.000	6	417.858.000	6	419.611.000
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				302.252.000		420.000.000		420.000.000		450.000.000		450.000.000
Terlaksanannya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	5	5	302.252.000	5	420.000.000	5	420.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000
Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas (%)	78	80	300.000.000	81	410.000.000	82	450.000.000	82	470.000.000	83	470.000.000
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.352.252.000		1.800.725.000		1.925.200.000		2.187.858.000		2.189.611.000
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimpletasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4	4	300.000.000	4	410.000.000	4	450.000.000	4	470.000.000	4	470.000.000
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				300.000.000		410.000.000		450.000.000		470.000.000		470.000.000
Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4	4	300.000.000	4	410.000.000	4	450.000.000	4	470.000.000	4	470.000.000
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Predikat Baik" (%)	79	81	275.000.000	83	370.000.000	85	400.000.000	87	450.000.000	88	450.000.000
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				1.352.252.000		1.800.725.000		1.925.200.000		2.187.858.000		2.189.611.000
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mengimpletasikan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	275.000.000	2	370.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000
4.01.02.1.02.0001 - Pemfasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				275.000.000		370.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000
Terlaksanannya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	275.000.000	2	370.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI				1.965.015.000		2.030.412.000		2.147.148.000		2.390.352.000		2.441.278.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
DAERAH												
Meningkatnya Kerja Sama Daerah Yang Diimplementasikan	Persentase Kerja Sama Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi (%)	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	830.000.000	100	850.000.000
4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				700.000.000		700.000.000		800.000.000		830.000.000		850.000.000
Meningkatnya kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)		3	700.000.000	3	700.000.000	4	800.000.000	4	830.000.000	4	850.000.000
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		1		1		1		1		1	
4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				400.000.000		400.000.000		500.000.000		500.000.000		520.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)		3	400.000.000	3	400.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	520.000.000
4.01.03.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				100.000.000		100.000.000		100.000.000		130.000.000		130.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi (Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000
4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Meningkatnya Kualitas administrasi tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Regulasi (%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	610.000.000	100	610.000.000
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		610.000.000		610.000.000
Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	610.000.000	1	610.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perataan Wilayah (Dokumen)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)		1		1		1		1		1	
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		130.000.000		130.000.000
Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000
4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				100.000.000		100.000.000		100.000.000		130.000.000		130.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000
4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000
Terlaksanannya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)		2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Sesuai Regulasi (%)	100	100	765.015.000	100	830.412.000	100	847.148.000	100	950.352.000	100	981.278.000
4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah				765.015.000		830.412.000		847.148.000		950.352.000		981.278.000
Optimalnya penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	1	1	765.015.000	1	830.412.000	11	847.148.000		950.352.000	1	981.278.000
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		220.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	11	200.000.000		200.000.000	1	220.000.000
4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000
Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000
4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				365.015.000		430.412.000		447.148.000		450.352.000		461.278.000
Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	4	4	365.015.000	4	430.412.000	4	447.148.000	4	450.352.000	4	461.278.000
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				20.328.228.645		21.303.475.000		22.618.891.000		25.311.874.000		25.913.290.000
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bina Spiritual	Persentase Kebijakan Bina Spiritual yang Dimanfaatkan Sesuai Regulasi (%)	100	100	18.928.228.645	100	19.903.475.000	100	21.218.891.000	100	23.911.874.000	100	24.513.290.000
4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				18.928.228.645		19.903.475.000		21.218.891.000		23.911.874.000		24.513.290.000
Optimalnya fasilitasi pembinaan mental spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)		6	18.928.228.645	6	19.903.475.000	8	21.218.891.000	8	23.911.874.000	8	24.513.290.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)		1		1		1		1		1	
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				17.928.228.645		18.903.475.000		20.218.891.000		22.911.874.000		23.513.290.000
Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)		6	17.928.228.645	6	18.903.475.000	8	20.218.891.000	8	22.911.874.000	8	23.513.290.000
Meningkatnya Kualitas kebijakan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Persentase kebijakan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan sesuai regulasi (%)	100	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000	100	1.400.000.000
4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	2	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	2	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	2	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	3	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	3	3		3		3		3		3	
4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000
4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000
4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				2.415.751.000		2.806.132.000		2.967.468.000		3.303.588.000		3.373.970.000
Meningkatnya Kualitasi Layanan Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan HAM yang terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	1.207.875.500	100	1.403.066.000	100	1.483.734.000	100	1.651.794.000	100	1.686.985.000
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				1.207.875.500		1.403.066.000		1.483.734.000		1.651.794.000		1.686.985.000
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	36	22	603.937.000	22	701.532.000	22	741.866.000	22	825.896.000	22	843.491.000
4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				603.937.000		701.532.000		741.866.000		825.896.000		843.491.000
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	36	22	603.937.000	22	701.532.000	22	741.866.000	22	825.896.000	22	843.491.000
Meningkatnya Penanganan Perkara	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	16	12	603.938.500	12	701.534.000	12	741.868.000	12	825.898.000	12	843.494.000
4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				603.938.500		701.534.000		741.868.000		825.898.000		843.494.000
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	16	12	603.938.500	12	701.534.000	12	741.868.000	12	825.898.000	12	843.494.000
Meningkatnya kualitas layanan produk hukum	Persentase Fasilitasi Produk Hukum yang terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	1.207.875.500	100	1.403.066.000	100	1.483.734.000	100	1.651.794.000	100	1.686.985.000
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.207.875.500		1.403.066.000		1.483.734.000		1.651.794.000		1.686.985.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	60	32	209.384.000	32	289.604.000	32	289.604.000	32	289.604.000	32	289.604.000
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				209.384.000		289.604.000		289.604.000		289.604.000		289.604.000
Terlaksanannya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	60	32	209.384.000	32	289.604.000	32	289.604.000	32	289.604.000	32	289.604.000
Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4	4	403.337.100	4	403.337.100	4	403.337.100	4	403.337.100	4	403.337.100
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				403.337.100		403.337.100		403.337.100		403.337.100		403.337.100
Terlaksanannya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4	4	403.337.100	4	403.337.100	4	403.337.100	4	403.337.100	4	403.337.100
Meningkatnya Kualitas Layanan Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	16	20	595.154.400	20	710.124.900	20	790.792.900	20	958.852.900	20	994.043.900
	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	50	24		24		24		24		24	
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				430.220.000		545.190.500		625.858.500		793.918.500		829.109.500
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	16	20	430.220.000	20	545.190.500	20	625.858.500	20	793.918.500	20	829.109.500
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				164.934.400		164.934.400		164.934.400		164.934.400		164.934.400
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	50	24	164.934.400	24	164.934.400	24	164.934.400	24	164.934.400	24	164.934.400
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				810.000.000		1.504.637.000		1.591.145.000		1.771.371.000		1.809.110.000
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	810.000.000	100	1.504.637.000	100	1.591.145.000	100	1.771.371.000	100	1.809.110.000
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				230.000.000		624.637.000		656.145.000		680.000.000		700.000.000
Tersusunnya Kebijakan Perekonomian Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	624.637.000	1 Dokumen	656.145.000	1 Dokumen	680.000.000	1 Dokumen	700.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				150.000.000		460.000.000		470.000.000		480.000.000		490.000.000
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	460.000.000	3 Dokumen	470.000.000	3 Dokumen	480.000.000	3 Dokumen	490.000.000
4.01.06.1.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				80.000.000		164.637.000		186.145.000		200.000.000		210.000.000
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	164.637.000	1 Dokumen	186.145.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				230.000.000		300.000.000		315.000.000		351.371.000		365.000.000
Tersusunnya Kebijakan Sumber Daya Alam Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	315.000.000	1 Dokumen	351.371.000	1 Dokumen	365.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				150.000.000		155.000.000		165.000.000		190.000.000		195.000.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	5 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	195.000.000
4.01.06.1.02.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				80.000.000		145.000.000		150.000.000		161.371.000		170.000.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	2 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	161.371.000	1 Dokumen	170.000.000
4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				350.000.000		580.000.000		620.000.000		740.000.000		744.110.000
Tersusunnya Kebijakan BUMD dan BLUD Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.	2	1	350.000.000	1	580.000.000	1	620.000.000	1	740.000.000	1	744.110.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Limbah dan Sanitasi (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	2	1		1		1		1		1	
4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				150.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000		344.110.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	2	1	150.000.000	1	320.000.000	1	330.000.000	1	340.000.000	1	344.110.000
4.01.06.1.03.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				100.000.000		130.000.000		145.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	3	1	100.000.000	1	130.000.000	1	145.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.06.1.03.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				100.000.000		130.000.000		145.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	2	1	100.000.000	1	130.000.000	1	145.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				490.000.000		1.159.162.000		1.225.807.000		1.364.652.000		1.393.726.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	23,14	23,25	490.000.000	23,82	1.159.162.000	23,91	1.225.807.000	23,96	1.364.652.000	24,06	1.393.726.000
	Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	26,09	26,15		26,68		26,79		26,84		26,94	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	40	40		40		40		40		40	
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				170.000.000		400.000.000		399.890.000		500.000.000		500.000.000
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	170.000.000	1	400.000.000	1	399.890.000	1	500.000.000	1	500.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	2		2		2		2		2	
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				70.000.000		150.000.000		149.890.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	70.000.000	1	150.000.000	1	149.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150.000.000		290.000.000		305.917.000		341.586.000		350.000.000
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	150.000.000	1	290.000.000	1	305.917.000	1	341.586.000	1	350.000.000
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				50.000.000		130.000.000		105.917.000		141.586.000		150.000.000
Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1	1	50.000.000	1	130.000.000	1	105.917.000	1	141.586.000	1	150.000.000
4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	50.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	50.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				170.000.000		469.162.000		520.000.000		523.066.000		543.726.000
Terlaksananya Pembinaan SDM, Kapasitas Kelembagaan, dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	170.000.000	1	469.162.000	1	520.000.000	1	523.066.000	1	543.726.000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	40	100		240		240		240		240	
4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000		134.162.000		130.000.000		136.066.000		170.000.000
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	40	100	50.000.000	240	134.162.000	240	130.000.000	240	136.066.000	240	170.000.000
4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				70.000.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				50.000.000		135.000.000		140.000.000		167.000.000		173.726.000
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	167.000.000	1	173.726.000
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				780.000.000		1.020.878.000		1.079.572.000		1.201.863.000		1.227.458.000
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjut (%)	100	100	780.000.000	100	1.020.878.000	100	1.079.572.000	100	1.201.863.000	100	1.227.458.000
4.01.08.1.01 - Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan				460.000.000		590.878.000		629.572.000		681.863.000		692.458.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Pembangunan Daerah												
Terwujudnya Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	460.000.000	2 Laporan	590.878.000	2 Laporan	629.572.000	2 Laporan	681.853.000	2 Laporan	692.458.000
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				250.000.000		250.878.000		269.572.000		281.853.000		272.458.000
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	250.878.000	2 Laporan	269.572.000	2 Laporan	281.853.000	2 Laporan	272.458.000
4.01.08.1.01.0002 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				70.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000		210.000.000
Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	170.000.000	2 Laporan	180.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	210.000.000
4.01.08.1.01.0003 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				140.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000		210.000.000
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	170.000.000	2 Laporan	180.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	210.000.000
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				320.000.000		430.000.000		450.000.000		520.000.000		535.000.000
Terwujudnya Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	430.000.000	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	520.000.000	2 Laporan	535.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
4.01.08.1.02.0001 - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				100.000.000		115.000.000		120.000.000		150.000.000		155.000.000
Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	115.000.000	4 Dokumen	120.000.000	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	155.000.000

SUB BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	(Dokumen)											
4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				70.000.000		115.000.000		120.000.000		150.000.000		155.000.000
Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	155.000.000
4.01.08.1.02.0003 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				150.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		225.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	225.000.000

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menetapkan sejumlah sub kegiatan strategis yang berfokus pada Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik, Peningkatan Materi dan Informasi Pimpinan,Peningkatan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah, Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan Daerah, Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan, Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Kebijakan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat Yang Tepat Sasaran dan Berkelanjutan, Peningkatan Administrasi Tata Pemerintahan Dalam Penyelengaran Otonomi Daerah, Peningkatan Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Menyusun LKIP Perangkat Daerah Yang Berkualitas, Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Peningkatan Pembinaan ASN Dalam Pelaksanaan Budaya Kerja ASN Berakhlak. Subkegiatan prioritas tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
1.	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya Kualitas administrasi tata Pemerintahan	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
			4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
			4.01.03.1.01.0002 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	
			4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
			4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
			4.01.03.1.02.0003 - Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Meningkatnya Kerja Sama Daerah Yang Diimplementasikan	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
			4.01.03.1.03.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	
			4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
2.	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bina Spiritual	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
			4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
			4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
		Meningkatnya Kualitas kebijakan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.02.0001 - Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
			4.01.04.1.02.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
			4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
			4.01.04.1.03 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
			4.01.04.1.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	
			4.01.04.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			4.01.04.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	
4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Hukum				
3.	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya kualitas layanan produk hukum	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
			4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pengaturan	
			4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
			4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
			4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitasi Layanan Bantuan Hukum	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
			4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				
4.	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya Hasil Penataan Kelembagaan	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
			4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
			4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan	
		Budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
		Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi	4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas	4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
		Budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah	4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
		Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
			4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
4.01.0.00.0.00.01.0006 - Biro Umum dan Perlengkapan				
5.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Fasilitasi Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
6.	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.02.0003 - Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.0.00.0.00.01.0009 - Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol				
7.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Layanan Materi dan Informasi Pimpinan	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan	
			4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	
			4.01.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
			4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

4.2 Indikator Kinerja Utama

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, yang dapat diukur berdasarkan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, untuk mengukur atas keberhasilan tersebut perlu ditentukan Indikator persasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh tujuh biro sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing biro. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Sekretariat Daerah) dan lingkup sasaran (Biro-biro). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3.73	3.84	3.95	4.05	4.14	4.32	4.35	4.35
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	66.77	66.77	66.8	66.8	66.9	67	67
3	Nilai SAKIP	Nilai	69.24	70.1	72.41	74.95	76.65	80.05	80.9	80.9
4	Indeks Integritas Nasional	Indeks	71.21	72.74	74	76	78	80	82	82
5	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	10.72	11.1	11.8	12	12.2	13.5	13.6	13.6
6	Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi/Sister Province	Instansi	6	7	8	9	10	11	12	12
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	Indeks	N/A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
8	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	94.01	94.02	94.04	94.06	94.08	94.1	94.12	94.12
9	Indeks Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks	N/A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99.4	99.41	99.42	99.43	99.44	99.45	99.46	99.46
11	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3.45	3.49	3.52	3.55	3.58	3.61	3.64	3.64
13	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks ASN Berakhlak	Nilai	75.8	76	76.5	77	77.5	78	81	81
15	Persentase Kebijakan Ekonomi yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	89.23	89.3	89.4	90.5	90.7	90.8	91	91

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau seperangkat ukuran yang dirancang untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, yang berfokus pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional, dan merupakan bagian dari alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja pemerintah atau instansi. Adapun di bawah ini merupakan IKK Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang di harapkan dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan Sekretariat Daerah.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentasi Kerja Sama Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Kebijakan Bina Spiritual yang Dimanfaatkan Sesuai Reguliasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kebijakan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentasi Kebijakan Penyeleggaraan Otonomi Daerah Yang Sesuai Regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terpenuhi Sesuai Regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan HAM yang terlayani Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Fasilitasi Produk Hukum yang terlayani Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja minimal "Predikat Baik"	%	75.80	76	76.50	77	77.50	78	81	81
9.	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	84.02	84.02	84.10	84.10	84.20	84.20	84.30	84.30
10.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Predikat Baik"	%	79	80	81	83	85	87	88	88
11.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki pelaporan berkualitas	%	78	79	80	81	82	82	83	83
12.	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal Sangat Baik	%	94.01	94.02	94.04	94.06	94.08	94.10	94.12	94.12
13.	Persentase Layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda yang terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	Persentase Layanan Tata Usaha Setda yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	Presentase Fasilitasi Rumah Tangga Pimpinan Yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Nilai	26.09	26.13	26.15	26.68	26.79	26.84	26.94	26.94

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai	23.14	23.17	23.25	23.82	23.91	23.96	24.06	24.06
18.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	40	40	40	40	40	40	40	40
19.	Persentase pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjut	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21.	Persentase Layanan Materi dan Informasi Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
22.	Persentase Kebutuhan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan yang Terpenuhi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Hasil Analisis Sekretariat Daerah Provinsi Banten, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada setiap tahunnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Namun Demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Rencana Strategis ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu, ***"Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi"***, dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program atau kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahawa tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Noomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
   Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah;

6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir pada lampiran keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada Tanggal : 23 April 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN

Nana Supiana

Tembusan Yth:
1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tanggal : 23 April 2025

TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

A. Susunan Keanggotaan Tim Kerja :

Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
Wakil Ketua	:	1. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian
Sekretaris	:	Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol
Anggota	:	1. Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Setda Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 2. Haefi Fathudi, S.Sos (Perencana Ahli Muda) Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol; 3. Zulkifli Priatna Saputra. S.Sos, MM. (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 4. Ace Jaelani, A.Md. (Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan APBD) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 5. Indi Zaenur Anisa, SE, M.Ak (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 6. Ika Juarianti, S.STP (Pengelola Kepegawaian) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 7. Nanang Abdul Azid, S.Ak (Pelaksana) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 8. M. Arifin (Pelaksana) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol. 9. Dede Firman (Pelaksana) Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol.

B. Uraian Tugas :

1. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025- 2029;
2. Menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;

3. Menyusun Perhitungan Rumus Definisi Operasional dengan memperhatikan daftar dan kodefikasi data teknis perencanaan, evaluasi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.
4. Menyusun Dokumen Rencangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025-2029; dan
5. Melaporkan hasil dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 untuk dilaporkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Banten.